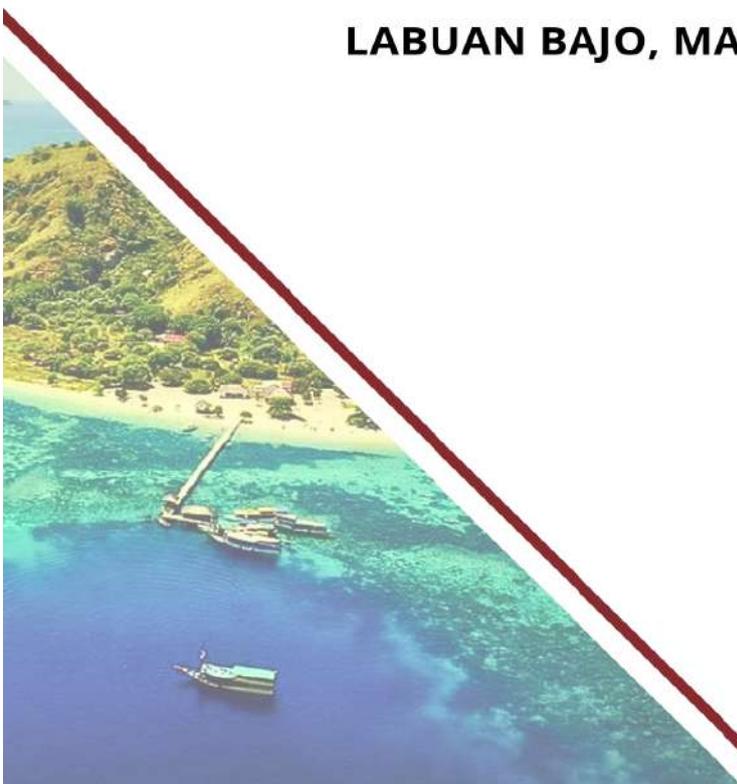




LAPORAN KEGIATAN

PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

LABUAN BAJO, MARET - NOVEMBER 2023



LAPORAN KEGIATAN

**PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

LABUAN BAJO, MARET – NOVEMBER 2023

Penyusun : Roseven Rudianto (Politeknik eLBajo Commodus)
Elisabeth Klara Sekar Cahyani (Yayasan WWF Indonesia)

Kontributor : Hana Nuraliyya Achdiat (Yayasan WWF Indonesia)
Kusnanto (Yayasan WWF Indonesia)
Joana Viviani (Yayasan WWF Indonesia)
Marius Y. Seran (Politeknik eLBajo Commodus)

© Yayasan WWF Indonesia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR	4
RINGKASAN.....	6
SINGKATAN DAN AKRONIM	8
PENGANTAR.....	9
TUJUAN	13
KELUARAN, HASIL YANG DIHARAPKAN, DAN CAPAIAN	13
METODE PELAKSANAAN	18
PENUTUP DAN REKOMENDASI.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Permenpar Nomor 14 Tahun 2016 dan Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021	15
Tabel 2. Proses Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kabupaten Manggarai Barat.....	18
Tabel 3. Penjelasan Skor yang Dikeluarkan ISTC.....	20
Tabel 4. Proses Pelaksanaan Kajian Penilaian Mandiri	21
Tabel 5. Penjelasan Penilaian Bagian Pengelolaan yang Berkelanjutan.....	28
Tabel 6. Penjelasan Penilaian Bagian Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi.....	38
Tabel 7. Penjelasan Penilaian Bagian Keberlanjutan Budaya	45
Tabel 8. Penjelasan Penilaian Bagian Lingkungan.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Tahun 2019	11
Gambar 2. Sosialisasi Penilaian Mandiri Pariwisata Berkelanjutan Kabupaten Manggarai Barat di Kantor Bappeda Manggarai Barat.....	24
Gambar 3. Proses Penilaian Mandiri Kriteria Tata Kelola Destinasi Dengan Metode DKT yang Diselenggarakan di Kantor Bappeda Manggarai Barat.....	25
Gambar 4. Visitasi Lapangan Untuk Validasi Data Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat.....	26
Gambar 5. Kegiatan Pemaparan Hasil Akhir Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat yang diselenggarakan pada 5 Oktober 2023 dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat.....	27
Gambar 6. Hasil Penilaian Mandiri Presentase Tingkat Keterpenuhan Indikator	62
Gambar 7. Perbandingan Presentase Tingkat Pemenuhan Indikator Aspek Pengelolaan yang Berkelanjutan.....	63

Gambar 8. Perbandingan Hasil Penilaian Mandiri Tahun 2019 dan 2023 Aspek Keberlanjutan Sosial Ekonomi.....	66
Gambar 9. Perbandingan Hasil Penilaian Mandiri Tahun 2019 dan 2023 Aspek Keberlanjutan Budaya	68
Gambar 10. Perbandingan Hasil Penilaian Tahun 20219 dan Tahun 2023 Aspek Keberlanjutan Lingkungan	69

RINGKASAN

Kegiatan Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 didasari dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Ada empat aspek penilaian berdasarkan pedoman tersebut, yaitu 1) Pengelolaan yang berkelanjutan, 2) Keberlanjutan Sosial Ekonomi, 3) Keberlanjutan Budaya, dan 4) Keberlanjutan Lingkungan.

Pelaksanaan penilaian mandiri dimulai dengan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan pariwisata. Tahap selanjutnya ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai pemangku kepentingan melalui DKT. Langkah selanjutnya ialah pengumpulan dan validasi dengan melakukan kunjungan kepada pemangku kepentingan, seperti OPD Kabupaten Manggarai Barat, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), NGO di Kabupaten Manggarai Barat, dan para pemangku lainnya.

Langkah selanjutnya ialah menganalisis pemenuhan indikator sesuai pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Analisis data dilakukan dengan penilaian menggunakan skala 1 hingga 4. Skor 1 ialah "tidak terpenuhi", skor ini berarti tidak memiliki data pemenuhan indikator yang dibutuhkan. Skor 2 ialah "kurang terpenuhi", skor ini berarti pemenuhan indikator yang dibutuhkan masih berupa rencana, belum ada pelaksanaannya. Sskor 3 ialah "sebagian terpenuhi", skor ini berarti indikator yang dibutuhkan terlaksana, namun tidak terdokumentasi. Skor 4 ialah "terpenuhi sepenuhnya", yang berarti Indikator yang dibutuhkan terlaksana dan terdokumentasi. Teknik ini diadaptasi dari Indonesia Sustainable Tourism Council (ISTC) atau Dewan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia untuk menilai desa wisata.

Hasil penilaian mandiri menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemenuhan indikator pemenuhan yang dapat dilihat peningkatan presentase kategori penilaian “terpenuhi sepenuhnya, dan menurunnya presentase kategori penilaian “tidak terpenuhi” dibandingkan hasil penilaian mandiri tahun 2019. Hasil ini didasari oleh pelaksanaan kegiatan para pemangku kepentingan dan adanya regulasi yang berlaku menjadi data pemenuhan indikator destinasi pariwisata berkelanjutan. Namun demikian, masih diperlukan kegiatan peningkatan pemenuhan indikator standar pedoman pariwisata berkelanjutan, seperti pelaksanaan kajian yang dilakukan secara periodik atau terencana, proses pembuatan konten promosi dan sinkronisasi media promosi mengenai UMKM dan daya Tarik wisata yang mengandung unsur kerentanan dan *code of conduct* atau kode etik berwisata dalam bahasa asing, dan pedoman pelaksanaan jasa *homestay* dan *guest house*.

Penilaian mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan tahun 2023 pada akhirnya menghasilkan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat yang dilandasi nilai-nilai keberlanjutan. Selanjutnya, diharapkan para pemangku kepentingan dapat menjadikan hasil penilaian mandiri ini sebagai landasan dalam penyusunan rencana aksi yang relevan dengan nilai-nilai keberlanjutan di Kabupaten Manggarai Barat.

SINGKATAN DAN AKRONIM

AD ART	:	Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga
BAPPEDA	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
BPOLBF	:	Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
BRIDA	:	Badan Riset dan Inovasi Daerah
CBT	:	<i>Community Based Tourism</i>
DISPAREKRAFUD	:	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
DKT	:	Diskusi Kelompok Terpumpun
GSTC	:	<i>Global Sustainable Tourism Council</i>
ISTA	:	<i>Indonesia Sustainable Tourism Award</i>
ISTC	:	<i>Indonesia Sustainable Tourism Certification</i>
POKDARWIS	:	Kelompok Sadar Wisata
PFON	:	<i>Plastic Free Ocean Network</i>
SDM	:	Sumber Daya Manusia
STC	:	<i>Sustainable Tourism Certification</i>
STDev	:	<i>Sustainable Tourism Development</i>
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil Menengah

PENGANTAR

Tren pariwisata mengalami perubahan dari masa ke masa. Salah satu konsep pariwisata menjadi konsep pembangunan pariwisata sebuah destinasi ialah pariwisata berkelanjutan. Istilah pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism diperkenalkan pada tahun 1993 oleh Bramwell and Lance (Yoopetch dan Nimsal, 2019). Bramwell dan Lance (1993) mendefinisikan sustainable tourism sebagai pendekatan positif untuk mengurangi kerusakan yang timbul dari interaksi industri pariwisata, wisatawan/pengunjung, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah. United Nation World Tourism Organization (UNWTO) pada tahun 2005 menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan bukanlah sebuah bentuk pariwisata, namun semua pariwisata harus diupayakan untuk lebih berkelanjutan (Wagenseil dkk, 2022). Linnes dkk (2022) berpendapat bahwa konsep pariwisata berkelanjutan merupakan paradigma mainstream yang menekankan pada keseimbangan alam, sosial budaya, dan ekonomi, dimana pengunjung dapat menikmati sumber daya alam pada sebuah destinasi wisata dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memberikan manfaat finansial bagi penduduk tuan rumah.

Keberlanjutan menjadi kata kunci dalam konsep pengembangan pariwisata saat ini. Namun pada awalnya konsep pariwisata berkelanjutan hanya sebagai ide yang brilian namun tidak dapat dilaksanakan karena konsep industri pariwisata dianggap merusak dan tidak dapat mengkampanyekan nilai-nilai berkelanjutan (Berno dan Bricker, 2001). Bahkan McKercher (2003) menegaskan bahwa tantang pemerintahan secara global ialah mencari pembangunan pariwisata berkelanjutan untuk mencapai keseimbangan terbaik antara manfaat ekonomi dan dampak sosial dan lingkungan. Guo dkk (2019) menambahkan bahwa salah satu tantangan terbesar dari penerapan pariwisata berkelanjutan ialah memasukan konsep pariwisata berkelanjutan dalam kebijakan publik.

Upaya yang dilakukan secara global untuk merumuskan standar penerapan pariwisata berkelanjutan dilakukan ialah mendirikan *Global Sustainable Tourism Council (GSTC)*. Menurut Bricker dan Schultz (2011) GSTC didirikan untuk sebagai upaya global untuk

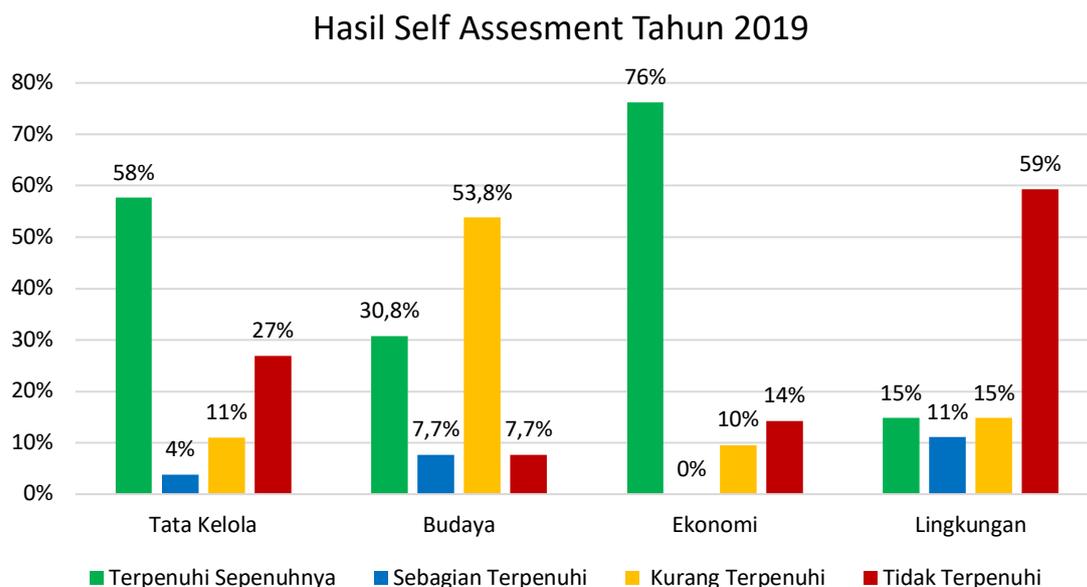
mengatasi perbedaan persepsi mengenai pariwisata berkelanjutan dan untuk menemukan titik temu dalam mengukur efektivitas penerapan pariwisata berkelanjutan. Bushell dan Bricker (2016) menjelaskan bahwa GSTC menyatukan berbagai berbagai pihak seperti swasta, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, individu dan komunitas untuk terlibat dalam mencapai praktik terbaik dalam pariwisata berkelanjutan.

Indonesia sendiri telah memiliki kebijakan publik yang mengatur pariwisata berkelanjutan melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) Nomor 14 tahun 2016 yang juga mengatur Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Peraturan ini mengadopsi standar GSTC dalam menerapkan pariwisata berkelanjutan.

Dengan perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata prioritas, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melakukan *self-assessment* di tahun 2019. Hasilnya, pada aspek 1) tata kelola sebanyak 58% indikator terpenuhi sepenuhnya, 4% indikator- terpenuhi Sebagian, 11% indikator – kurang terpenuhi, dan 27% indikator tidak terpenuhi; 2) aspek budaya 30,8% indikator terpenuhi sepenuhnya, 7,7% indikator- terpenuhi sebagian, 53,8% indikator – kurang terpenuhi, dan 7,7% indikator tidak terpenuhi; 3) aspek ekonomi 76% indikator terpenuhi sepenuhnya, 0% indikator- terpenuhi sebagian, 10% indikator – kurang terpenuhi, dan 14% indikator tidak terpenuhi; dan 4) aspek lingkungan 15% indikator terpenuhi sepenuhnya, 11% indikator- terpenuhi sebagian, 15% indikator – kurang terpenuhi, dan 59% indikator tidak terpenuhi. Lebih detail dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah.

Seiring berkembangnya industri pariwisata, GSTC mengeluarkan standar baru dalam menerapkan pariwisata berkelanjutan, dimana Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengadaptasi perubahan standar GSTC yang baru tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Regulasi mengenai Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan ini memiliki tujuan untuk memberikan acuan yang komprehensif mengenai pengelolaan destinasi pariwisata secara berkelanjutan, sehingga terwujud pengelolaan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan.



Gambar 1. Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Tahun 2019
 Sumber: Swisscontact Sustour, 2019

Industri pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat mengalami perkembangan yang signifikan pada saat ini. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas dan diikuti Pembangunan pariwisata. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat juga dapat dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan yang meningkat pasca pandemic COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur jumlah kunjungan wisatawan mencapai 259.574 jiwa (BPS NTT, 2023).

Perkembangan pariwisata yang meningkat secara signifikan di Kabupaten Manggarai Barat membutuhkan sistem *monitoring*. Terlebih, konsep pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat dilandasi oleh nilai-nilai keberlanjutan. Nilai-nilai keberlanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026 dimana Misi 1, yaitu “Mengembangkan Pariwisata secara Berkelanjutan dan Inklusif sebagai Penggerak Utama Ekonomi”. Selain itu, visi dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 – 2025 ialah “Terwujudnya manggarai barat sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan prinsip ekowisata berbasis masyarakat”.

Dalam rangka pengembangan pariwisata yang berorientasi pada nilai-nilai berkelanjutan dibentuk Tim Kerja Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Pariwisata Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Di Kabupaten Manggarai Barat yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Manggarai Barat No 04/KEP/HK/2022, dimana salah satu tugasnya ialah melakukan penilaian mandiri terhadap destinasi Kabupaten Manggarai Barat sesuai standar pariwisata berkelanjutan berdasarkan Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan tersebut, diperlukan pelaksanaan penilaian mandiri pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berpedoman pada Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021.

TUJUAN

Adapun tujuan penilaian mandiri pembangunan pariwisata berkelanjutan ialah untuk mengetahui dan mengharmonisasi perkembangan penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat yang berorientasi pada Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

KELUARAN, HASIL YANG DIHARAPKAN, DAN CAPAIAN

Keluaran dari kegiatan penilaian mandiri Kabupaten Manggarai Barat dengan acuan Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan adalah:

1. Terlaksana penilaian mandiri terhadap Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan.
2. Tersedia hasil penilaian mandiri Kabupaten Manggarai Barat yang mengacu pada Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata.
3. Tersedia hasil laporan analisis penilaian mandiri Kabupaten Manggarai Barat yang mengacu pada Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan penilaian mandiri Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 adalah:

1. Terbangunnya pemahaman pembangunan pariwisata berkelanjutan sesuai Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang Pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat.
2. Adanya rekomendasi yang didasari hasil analisis penilaian mandiri pembangunan pariwisata berkelanjutan Kabupaten Manggarai Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

GSTC atau Dewan Pariwisata Berkelanjutan Global ialah badan yang mengelola Kriteria GSTC, yaitu standar global untuk perjalanan dan pariwisata berkelanjutan; serta memberikan akreditasi internasional pada Badan Sertifikasi pariwisata berkelanjutan. Kriteria Global Sustainable Tourism Council (GSTC) disusun dengan tujuan pemberian pemahaman bersama tentang pariwisata berkelanjutan. Dengan kata lain, kriteria GSTC bertujuan untuk menyeleraskan pemahaman terhadap pariwisata berkelanjutan.

Pengembangan dan revisi Kriteria dilakukan dengan tetap mematuhi Kode Pengaturan Standar dari Aliansi ISEAL (Standard-Setting Code of the ISEAL Alliance), sebuah badan yang diakui untuk memberikan panduan tentang norma internasional untuk mengembangkan standar-standar keberlanjutan di semua sektor. Kriteria akan direvisi setiap 3 sampai 5 tahun. Kriteria Global Sustainable Tourism Council (GSTC) sendiri dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 1) Kriteria Tur Operator; 2) Kriteria Hotel; dan 3) Kriteria Destinasi. Tiap kriteria mengalami proses pengembangan dan revisi yang dilakukan dengan tetap mematuhi Kode Pengaturan Standar dari Aliansi ISEAL (*Standard-Setting Code of the ISEAL Alliance*), sebuah badan yang diakui untuk memberikan panduan tentang norma internasional untuk mengembangkan standar-standar keberlanjutan di semua sektor.

GSTC juga menjelaskan bahwa pada dasarnya kriteria GSTC mendeskripsikan **apa** yang sepantasnya dilaksanakan, bukan tentang **bagaimana** melakukannya atau mengetahui bahwa tujuan telah tercapai. Dijelaskan lebih lanjut bahwa peran tersebut dipenuhi oleh indikator-indikator kinerja, bahan-bahan edukasi terkait, dan akses kepada piranti untuk melaksanakan, yang mana semuanya adalah pelengkap penting bagi Kriteria GSTC.

Perbandingan Permenpar No 14 Tahun 2016 dengan Permenparekraf No 9 Tahun 2021

Sebagai institusi tingkat nasional yang membidangi pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki fokus terhadap penerapan pariwisata berkelanjutan. Salah satu upaya agar dapat mengukur penerapan pariwisata berkelanjutan ialah dengan mengeluarkan peraturan menteri pariwisata terkait pedoman pariwisata berkelanjutan. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pariwisata Berkelanjutan mengadopsi standar internasional Global Sustainable Tourism Council (GSTC) yang telah diakui oleh United Nation World Tourism Organization (UNWTO).

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 sendiri telah mendapatkan status GSTC-Recognized atau pengakuan dari GSTC (GSTC, 2016). Dijelaskan lebih lanjut bahwa standar pariwisata berkelanjutan telah dinilai oleh para ahli dan dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh GSTC. Peraturan ini masih berorientasi kepada kriteria destinasi versi 1.0 yang disahkan oleh GSTC pada tahun 2013. GSTC mengeluarkan standar kriteria destinasi versi 2.0 pada tahun 2019. Standar GSTC ini kembali diadopsi oleh Kementerian Pariwisata dengan mengeluarkan Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pariwisata Berkelanjutan. Adapun perbedaan dasar dari Permenpar Nomor 14 Tahun 2016 dengan Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Perbedaan Permenpar Nomor 14 Tahun 2016 dan Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021

No	Perbedaan	Permenpar Nomor 14 Tahun 2016	Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021
1	Relasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Tidak dijelaskan keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Sudah dijelaskan keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan rincian tujuan

No	Perbedaan	Permenpar Nomor 14 Tahun 2016	Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021
			pembangunan yang sesuai dengan kriteria
2	Jenis Bagian	a. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan; b. Pemanfaatan Ekonomi untuk Masyarakat Lokal; c. Pelestarian Budaya bagi Masyarakat dan Pengunjung; dan d. Pelestarian Lingkungan	a. Pengelolaan Berkelanjutan; b. Keberlanjutan Budaya; c. Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi; dan d. Keberlanjutan Lingkungan
3	Komponen Bagian	a. Kriteria, b. Indikator dan c. Bukti pendukung	a. Kriteria, b. Sub kriteria c. Indikator dan d. Bukti pendukung
4	Jumlah Kriteria	31 kriteria	38 kriteria
5	Jumlah Indikator	105 indikator	175 indikator

Dalam Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 keempat bagian dijelaskan lebih terperinci dengan kriteria, subkriteria, indikator, dan bukti pendukung, dimana:

1. Kriteria ialah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan pada standar destinasi pariwisata berkelanjutan.
2. Subkriteria ialah butir turunan dari kriteria yang memberikan detail pengelompokan dari indikator.
3. Indikator ialah sesuatu yang memperjelas dan dapat memberikan petunjuk atau keterangan dari kriteria.

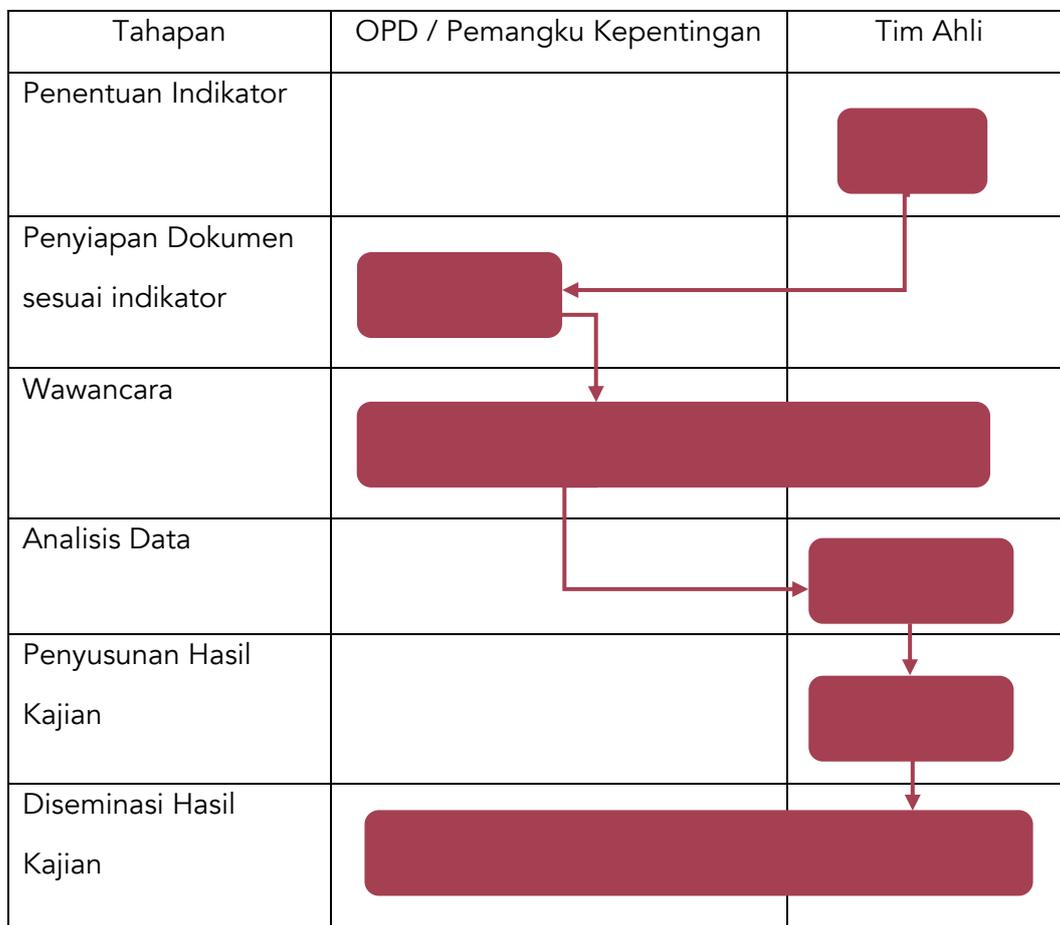
4. Bukti pendukung ialah sesuatu yang menyatakan suatu kebenaran peristiwa, keterangan nyata atau tanda, baik berbentuk softcopy atau hardcopy yang tersedia dan dapat dibuktikan oleh di destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan.

Pada Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 dijelaskan bahwa kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan dapat diterapkan di berbagai tipe/jenis destinasi pada berbagai lokasi, yaitu: Perkotaan; Pedesaan; Pegunungan; Pesisir; atau kombinasi dari keempat jenis ini. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kriteria juga diterapkan pada destinasi berskala besar, seperti kota dan kabupaten, dsb dan skala kecil, seperti Taman Nasional; Kelompok; Desa Wisata; Komunitas Lokal; dll. Penerapan standar destinasi pariwisata berkelanjutan berkaitan dengan kriteria destinasi, dan berlaku bagi bukan badan/perorangan, dan dapat diterapkan melalui organisasi manajemen destinasi yang bertanggung jawab atas koordinasi yang pendekatannya berhubungan dengan pariwisata berkelanjutan. Keberadaan organisasi (pengelola yang bertanggungjawab) merupakan persyaratan utama dalam penerapan standar destinasi pariwisata berkelanjutan. Perlu digarisbawahi bahwa keberadaan organisasi yang dimaksud tidak hanya merupakan sebuah badan otoritas lokal atau badan sektor publik saja tetapi dalam penerapan standar ini dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak pemangku kepentingan yakni Pemerintah, Sektor Publik dan Swasta.

METODE PELAKSANAAN

METODOLOGI

Tabel 2. Proses Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kabupaten Manggarai Barat



Kajian ini akan dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif yang berarti hasil analisis data dijelaskan dengan detail untuk dapat menggambarkan hasil kajian. Kajian dimulai dengan penentuan indikator yang berorientasi pada Permenparekrif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pariwisata Berkelanjutan. Langkah selanjutnya OPD dan pemangku kepentingan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sesuai indikator yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan data yang detail, enumerator akan melakukan wawancara kepada OPD/Pemangku kepentingan mengenai kendala yang dihadapi dalam memenuhi indikator dan peluang peningkatan pemenuhan indikator tersebut. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mendapatkan hasil kajian berupa gambaran penerapan pariwisata

berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pariwisata Berkelanjutan.

POPULASI DAN SAMPLING

Populasi dalam kajian ini ialah seluruh pemangku kepentingan bidang pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Teknik sampling yang digunakan ialah *purposive sampling* dengan berlandaskan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No 04/KEP/HK/2022 Tentang Tim Kerja Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Pariwisata Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan Di Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini bertujuan agar narasumber yang ditentukan merupakan para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat.

TEKNIK PENGUMPULAN DAN VALIDASI DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini ialah teknik wawancara. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih terperinci dan mendalam. Selain itu, teknik validasi data yang digunakan ialah triangulasi sumber data. Adapun triangulasi data yang dilakukan dalam kajian ini ialah wawancara, observasi dokumen tertulis, dan pencarian dokumentasi secara daring (di internet).

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan ialah mix methode, dimana data dikumpulkan terlebih dahulu melalui wawancara, kemudian data hasil wawancara dimasukkan dalam penilaian skala 1 hingga 4. Teknik ini diadaptasi dari Indonesia Sustainable Tourism Council (ISTC) untuk menilai desa wisata. Adapun penjelasan skor tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Penjelasan Skor yang Dikeluarkan ISTC

Harkat	Kriteria	Penjelasan (contoh)
1	Tidak Terpenuhi	Tidak memiliki indikator yang dibutuhkan
2	Kurang Terpenuhi	Indikator yang dibutuhkan masih berupa rencana, belum ada pelaksanaannya
3	Sebagian Terpenuhi	Indikator yang dibutuhkan terlaksana, namun tidak terdokumentasi
4	Terpenuhi Sepenuhnya	Indikator yang dibutuhkan terlaksana dan terdokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan penilaian mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari sejumlah rangkaian acara, dari tahap awal, antara, hingga akhir. Adapun rangkaian kegiatan tersebut dijelaskan secara mengenai waktu, tempat pelaksanaan, jumlah dan asal peserta pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Proses Pelaksanaan Kajian Penilaian Mandiri

NO.	WAKTU PELAKSANAAN	AGENDA KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN	ASAL PESERTA	JUMLAH PESERTA
1.	Selasa, 14 Maret 2023	Sosialisasi Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat	Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manggarai Barat	Labuan Bajo	54 peserta (39L, 16P)
2.	Jumat, 17 Maret 2023	DKT Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat	Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manggarai Barat	Labuan Bajo	35 peserta (27L, 8P)
3.	Senin – Jumat, 27 Maret – 5 April 2023	Visitasi Lapangan Untuk Validasi Data Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat	Kantor OPD Kabupaten Manggarai Barat Kantor Pemangku Kepentingan lainnya (NGO, BTNK, BPOLBF, KCCD, dll)	Labuan Bajo	11 Peserta

NO.	WAKTU PELAKSANAAN	AGENDA KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN	ASAL PESERTA	JUMLAH PESERTA
4.	23 Agustus 2023	Pemaparan Hasil Sementara Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat	Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manggarai Barat	Labuan Bajo	8 peserta (5L, 3P)
5.	5 – 22 September 2023	Proses kedua - Pengumpulan Dokumen dan Bukti Pendukung serta Validasi Data Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat	Kantor OPD Kabupaten Manggarai Barat Kantor Pemangku Kepentingan lainnya (NGO, BTNK, BPOLBF, KCCD, dll)	Labuan Bajo	-
6.	5 Oktober 2023	Pemaparan Hasil Akhir Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat	Hotel La Prima	Labuan Bajo	45 peserta (34L ,11P)

Tahap 1 - Sosialisasi Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat

Penilaian mandiri pembangunan pariwisata berkelanjutan Kabupaten Manggarai Barat diawali dengan pertemuan kegiatan sosialisasi penilaian mandiri yang dilaksanakan pada 14 Maret 2022 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Manggarai Barat. Dalam kegiatan sosialisasi ini hadir 54 peserta yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Manggarai Barat, seperti OPD Kabupaten Manggarai Barat, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Yayasan Bintari, Yayasan Burung Indonesia, dan beberapa tokoh masyarakat.

Ada dua agenda dalam kegiatan sosialisasi penilaian mandiri pembangunan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu: 1) rapat perdana tim kerja daerah dalam mendukung pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat. Pada agenda ini disosialisasikan SK Bupati Manggarai Barat No 4/KEP/HK/2022 terkait tim kerja daerah dan target kinerja tim kerja daerah tersebut; 2) sosialisasi kegiatan penilaian mandiri pembangunan pariwisata berkelanjutan Manggarai Barat. Pada agenda ini disampaikan latar belakang, maksud dan tujuan, kriteria penilaian mandiri, dan diskusi.

Adapun tujuan dari kegiatan ini ialah 1) Membangun pemahaman konsep pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat; 2) Memberikan persamaan persepsi terkait gambaran kriteria yang digunakan dalam penilaian mandiri berdasarkan Permenparekraf No 9 Tahun 2021, 3) memetakan ketersediaan dokumen berdasarkan indikator pada tiap-tiap pemangku kepentingan, dan 4) membangun komitmen para pemangku kepentingan dalam penilaian mandiri pariwisata berkelanjutan Kabupaten Manggarai Barat.



Gambar 2. Sosialisasi Penilaian Mandiri Pariwisata Berkelanjutan Kabupaten Manggarai Barat di Kantor Bappeda Manggarai Barat

Tahap 2 – DKT Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat

Tahap kedua dalam rangkaian kegiatan Penilaian Mandiri Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat ialah Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) penilaian mandiri. Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) diselenggarakan pada 17 Maret 2023 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah OPD Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki dokumen indikator penilaian berdasarkan hasil pemetaan pada pertemuan sebelumnya.

Alur kegiatan dilaksanakan dengan menilai tiap indikator pada tiap kriteria melalui proses wawancara pada tiap OPD berdasarkan hasil pemetaan sebelumnya. Konsultan dan fasilitator merekam diskusi penilaian mandiri tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun ialah 1) OPD belum membawa dokumen yang dibutuhkan sebagai bahan penilaian indikator, 2) Waktu yang dibutuhkan dalam penilaian mandiri belum cukup untuk menyelesaikan penilaian

mandiri, 3) Proses penilaian mandiri dilanjutkan dengan validasi data pada setiap pemangku kepentingan tiap indikator yang dilakukan dengan cara wawancara di tiap kantor pemangku kepentingan tersebut.



Gambar 3. *Proses Penilaian Mandiri Kriteria Tata Kelola Destinasi Dengan Metode DKT yang Diselenggarakan di Kantor Bappeda Manggarai Barat*

Tahap 3 – Visitasi Lapangan Untuk Validasi Data Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat

Tahap ketiga dalam rangkaian penilaian mandiri ini ialah visitasi lapangan untuk validasi data. Alur validasi data dilakukan dengan melakukan kunjungan ke tiap pemangku kepentingan yang telah dipetakan pada diskusi kelompok terpumpun yang merupakan hasil tahap sebelumnya, seperti OPD Kabupaten Manggarai Barat, NGO, BPOLBF, KCCD, BTNK, dsb. Tahap ini dilakukan agar para pemangku kepentingan dapat memberikan informasi yang lebih rinci mengenai indikator penilaian pada tiap kriteria. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan data yang dibutuhkan sebagai bahan penilaian mandiri. Selain itu, tahap ini juga menjadi proses validasi data yang telah terkumpul.



Gambar 4. *Visitasi Lapangan Untuk Validasi Data Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya*

Tahap 4 – Pemaparan Hasil Sementara Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat Kepada Bappeda Kabupaten Manggarai Barat

Tahap pemaparan hasil dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2023. Pada tahap ini, hasil sementara disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Manggarai Barat sebagai mitra pelaksana. Tujuan dari pemaparan ini untuk memonitoring dan menyusun rencana tindak lanjut sebagai strategi penyelesaian kajian ini. Rencana Tindak Lanjut disusun berdasarkan kendala dan kondisi yang ditemukan dalam proses pengumpulan data. Tahap ini juga bertujuan untuk menghimpun masukan dari Bappeda di dalam penyempurnaan hasil penilaian mandiri yang akan dipaparkan secara final kepada tim kerja daerah. Pada kegiatan ini disepakati pada 5 Oktober 2023 akan dilakukan pemaparan hasil akhir penilaian mandiri pembangunan pariwisata berkelanjutan Kabupaten Manggarai Barat.

Tahap 5 – Pemaparan Hasil Akhir Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat

Diseminasi hasil akhir kajian dilaksanakan pada 5 Oktober 2023. Tahap ini tim ahli memaparkan hasil kajian penilaian mandiri pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat. Pada tahap ini para pemangku kepentingan memberikan pendapat dan masukan. Kegiatan ini. Proses penilaian mandiri dengan indikator GSTC bukanlah proses untuk mensertifikasi atau memberikan akreditasi kepada destinasi. Namun, untuk memberikan gambaran proses Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat. Oleh karena itu, penyusunan rencana aksi sebagai awal dalam menerapkan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat dirasa cukup penting menjadi tindak lanjut dari hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat.



Gambar 5. Kegiatan Pemaparan Hasil Akhir Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Manggarai Barat yang diselenggarakan pada 5 Oktober 2023 dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat

HASIL

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dijelaskan bahwa ruang lingkup regulasi tersebut meliputi empat bagian, yaitu: 1) pengelolaan berkelanjutan; 2) keberlanjutan sosial dan ekonomi; 3) keberlanjutan budaya; dan 4) keberlanjutan lingkungan. Adapun hasil penilaian yang diperoleh berdasarkan data yang terkumpul sebagai berikut:

1) Pengelolaan Yang Berkelanjutan

Bagian pengelolaan yang berkelanjutan terdiri dari 52 indikator. Berdasarkan hasil analisis data yang terkumpul, sebanyak 58% indikator mendapat kategori penilaian terpenuhi sepenuhnya. Selanjutnya 23% indikator mendapatkan kategori penilaian sebagian terpenuhi, 15% indikator – kurang terpenuhi, dan 4% mendapatkan kategori penilaian tidak terpenuhi. Lebih detail mengenai penjelasan penilaian bagian Pengelolaan yang Berkelanjutan dijabarkan pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 5. Penjelasan Penilaian Bagian Pengelolaan yang Berkelanjutan

I. Struktur dan kerangka pengelolaan	
a. Tanggungjawab pengelolaan destinasi	
A.I.a.1	Destinasi memiliki organisasi atau kelompok-kelompok yang bertanggung jawab dan relevan.
Bukti Pendukung	Terdapat SK Pokdarwis Terdapat BUMDes Terdapat Forum tata kelola SK No. 04/KEP/HK/2022 Tentang Tim Kerja Daerah dalam mendukung pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Adanya Tim Kerja Daerah dalam mendukung pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat yang telah diatur dalam SK No. 04/KEP/HK/2022
A.I.a.2	Destinasi memiliki rencana keuangan dan anggaran serta sumber-sumber pendanaan yang berkelanjutan
Bukti Pendukung	Rencana Kerja & Anggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021 mengatur rencana keuangan daerah yang didalamnya berisi tentang pariwisata berkelanjutan.

Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	-
A.I.a.3	Destinasi memiliki badan-badan (pemangku kepentingan, kemitraan) yang terlibat dalam berbagai aktivitas pengelolaan berkelanjutan.
Bukti Pendukung	Adanya kerja sama dengan organisasi pendidikan tinggi Politeknik eLBajo Commodus Adanya kerja sama dengan NGO WWF Indonesia, Yayasan Bintari, Burung Indonesia, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	-
A.I.a.4	Destinasi mempunyai SDM yang memiliki minat dan komitmen serta pengalaman yang sesuai untuk mengelola organisasi
Bukti Pendukung	Adanya proses seleksi yang dilakukan sesuai regulasi dalam merekrut ASN/PNS Desa wisata memiliki pokdarwis
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Mayoritas pokdarwis belum mampu menyusun program kerja yang terukur
A.I.a.5	Destinasi memiliki pedoman dan proses tata kelola yang menunjukkan kepatuhan dan kepedulian terhadap prinsip-prinsip berkelanjutan. Dibuat secara transparan, disosialisasikan dan dapat diakses. Hal ini diberlakukan dalam kegiatan operasional kemitraan yang membutuhkan penyusunan kontrak terhadap komitmen penerapan berkelanjutan.
Bukti Pendukung	BTNK membuat SOP tentang pengelolaan pariwisata Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendorong bisnis pariwisata mengikuti sertifikasi CHSE Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) melakukan Lingko Award. Ada kegiatan sosialisasi CHSE di desa wisata.
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Lingko Award terakhir diselenggarakan pada tahun 2021.
b. Strategi dan rencana aksi pengelolaan destinasi	
A.I.b.1	Destinasi memiliki sebuah dokumen strategi dan rencana aksi (Jangka Panjang/Menengah/Pendek) yang dapat diakses.
Bukti Pendukung	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 - 2025, Rencana Induk Pariwisata Terintegrasi / Integrated Tourism Master Plan (ITMP)
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Saat ini Integrated Tourism Master Plan Labuan Bajo Flores sudah tersusun dan sedang pada tahap finalisasi. RIPPARDA Kabupaten Manggarai Barat berakhir tahun 2025
A.I.b.2	Strategi/rencana tampak jelas dan tersedia secara daring.
Bukti Pendukung	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2025 dapat diakses secara daring.

Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Rencana Induk Pariwisata Terintegrasi / Integrated Tourism Master Plan (ITMP) telah disusun dan sedang pada tahap finalisasi sehingga belum dapat diakses secara umum. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 - 2025 dapat diakses melalui situs JDIH Manggarai Barat
A.I.b.3	Destinasi melibatkan pemangku kepentingan dalam mengembangkan rencana
Bukti Pendukung	Ada Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun 2022.
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Pemangku kepentingan lainnya (Masyarakat, akademisi, dll) untuk pengembangan rencana sudah dilibatkan, hanya dibutuhkan penguatan dokumentasi kegiatan.
A.I.b.4	Isi strategi rencana aksi mengacu kepada prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, Kajian terhadap aset, isu dan resiko tertuang dalam dokumen perencanaan.
Bukti Pendukung	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 - 2025 mencakup strategi pelaksanaan dan mengacu pada prinsip berkelanjutan, Rencana Induk Pariwisata Terintegrasi / Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Rencana Aksi Pengembangan Desa Wisata
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Rencana Induk Pariwisata Terintegrasi / Integrated Tourism Master Plan (ITMP) telah disusun dan sedang pada tahap finalisasi.
A.I.b.5	Selain prinsip berkelanjutan dalam strategi dan rencana aksi harus memasukkan unsur kebijakan tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan (SDG's)
Bukti Pendukung	RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026 sudah memiliki kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama bagian Integrasi Program Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). (Bappeda)
c. Monitoring dan pelaporan	
A.I.c.1	Destinasi memiliki Indikator dan target spesifik terkait sosial ekonomi, budaya dan lingkungan yang dapat diukur secara kuantitatif dan hasilnya diidentifikasi.
Bukti Pendukung	Ada monitoring sosial ekonomi - kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Data kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2021
A.I.c.2	Pengukuran indikator serta hasil dilakukan dan dipublikasikan setidaknya setiap tahun.
Bukti Pendukung	Data kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2021
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui data tahun 2022

A.I.c.3	Destinasi memiliki bukti pelaporan dan monitoring atas tindakan dan hasil yang terdokumentasi secara tertulis
Bukti Pendukung	Dinas Pariwisata melakukan monitoring terhadap kepuasan wisatawan melalui <i>exit survey</i> .
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Pelaksanaan <i>exit survey</i> dilakukan pada tahun 2020 & 2022.
A.I.c.4	Destinasi melaksanakan tinjauan terhadap sistem monitoring sebelumnya dan menjadwalkan untuk tinjauan selanjutnya (di masa depan)
Bukti Pendukung	Monitoring destinasi dilakukan sepanjang tahun.
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Monitoring telah dilakukan pada destinasi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat tetapi fokus masih dalam jumlah kunjungan.
II. Keterlibatan Pemangku Kepentingan	
a. Pelibatan badan usaha dan standar keberlanjutan	
A.II.a.1	Destinasi memiliki bukti atas komunikasi/pembahasan yang dilakukan secara teratur kepada Bisnis Pariwisata terkait, melalui media, pertemuan, kontak langsung, mengenai isu-isu keberlanjutan.
Bukti Pendukung	Terdapat grup whatsapp Forum Komunikasi Pariwisata yang menjadi kanal diskusi mengenai seluruh perkembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat.
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Forum komunikasi masih sudah memiliki kanal untuk berinteraksi antar para pemangku kepentingan, namun forum tatap muka belum diselenggarakan secara reguler.
A.II.a.2	Destinasi memberikan/menyediakan dukungan dan saran tentang keberlanjutan serta mempromosikannya kepada pemangku kepentingan bisnis pariwisata setempat.
Bukti Pendukung	BTNK membuat SOP tentang pengelolaan pariwisata Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendorong bisnis pariwisata mengikuti sertifikasi CHSE. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata (Disparekrafbud) melakukan Lingko Award. Ada kegiatan sosialisasi CHSE di desa wisata.
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Lingko Award diselenggarakan pada tahun 2021. Ada pelatihan Hospitality Practices On Sustainability (HOPS) di tahun 2021. Ada pelatihan Sustainable Hospitality Operational Management (SHOM) tahun 2021.
A.II.a.3	Jumlah dan persentase (%) bisnis pariwisata yang tersertifikasi standar pariwisata berkelanjutan (apakah diakui/ diakreditasi GSTC), dengan sasaran untuk penjangkauan yang lebih luas.
Bukti Pendukung	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata (Disparekrafbud) melakukan Lingko Award. Usaha pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan sertifikat CHSE

	Desa wisata Coal di Kabupaten Manggarai Barat masuk dalam Anugerah Desa Wisata
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Lingko award diselenggarakan pada tahun 2021. Hanya 1 desa di Kabupaten Manggarai Barat, jumlah masih sangat kecil.
A.II.a.4	Terdapat bukti atas disosialisasikan/dipromosikannya skema-skema sertifikasi bidang pariwisata berkelanjutan
Bukti Pendukung	Ada kegiatan sosialisasi CHSE di desa wisata, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) melakukan Lingko Award
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Lingko award dilakukan pada tahun 2021
A.II.a.5	Destinasi memiliki daftar badan-badan usaha terkait-pariwisata yang tersertifikasi, yang terjaga kemutakhiran datanya.
Bukti Pendukung	Daftar usaha yang tersertifikat (daftar usaha yang mendapatkan sertifikat CHSE, Lingko award, dsb)
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Daftar usaha yang tersertifikat belum diaktualisasikan/data belum terbaru.
b. Pelibatan dan umpan-balik dari penduduk setempat	
A.II.b.1	Terdapat bukti destinasi mendukung dan memfasilitasi partisipasi publik dalam perencanaan/pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan
Bukti Pendukung	Ada strategic visitor flow tahun 2020. Terdapat Forum Komunikasi Pariwisata Manggarai Barat SK No. 04/KEP/HK/2022 Tentang Tim Kerja Daerah dalam mendukung pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat yang anggotanya melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam program Fasilitas Masyarakat Desa Wisata (Fasmadewi)
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Masyarakat diundang pada forum-forum perencanaan pengembangan daerah, seperti musrenbang, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penyusunan ITMP. Terdapat program Fasmadewi.
A.II.b.2	Terdapat Informasi atas bentuk dan tingkatan dukungan bagi partisipasi publik tersebut.
Bukti Pendukung	SK No. 04/KEP/HK/2022 Tentang Tim Kerja Daerah dalam mendukung pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat. Petugas pemelihara cagar budaya di wilayah Manggarai Barat.
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Ada unsur perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Tim Kerja Daerah dalam mendukung pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat

	Unsur masyarakat menjadi petugas pemelihara cagar budaya di wilayah Manggarai Barat.
A.II.b.3	Terdapat survei yang dilakukan kepada masyarakat dan mekanisme umpan-balik sistematis lainnya, yang meliputi isu pariwisata.
Bukti Pendukung	Ada diskusi mengenai umpan balik masyarakat terhadap perkembangan pariwisata, khususnya desa wisata.
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Diskusi belum dilaksanakan secara terencana dan masih bersifat diskusi informal.
A.II.b.4	Terdapat bukti atas tindakan yang diambil untuk menanggapi umpan balik dari masyarakat setempat
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum ada dokumentasi mengenai kebijakan yang dilandasi umpan balik dari Masyarakat setempat.
A.II.b.5	Destinasi memiliki program informasi pendidikan dan pelatihan pariwisata yang diberikan kepada masyarakat setempat.
Bukti Pendukung	Penyelenggaraan pelatihan terkait kepariwisataan, seperti pelatihan kepemanduan, housekeeping, barista, dsb.
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Pelatihan dilakukan tiap tahun dan sudah menjadi program kerja OPD Kabupaten Manggarai Barat.
c. Pelibatan dan umpan balik dari pengunjung	
A.II.c.1	Destinasi melakukan dan melaporkan Survei Pengunjung (dan mekanisme umpan balik lainnya)
Bukti Pendukung	Pelaksanaan exit survey mengenai tingkat kepuasan wisatawan terhadap pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Pelaksanaan <i>exit survey</i> dilaksanakan terakhir di tahun 2022. (Disparekrabud)
A.II.c.2	Survei dan umpan-balik yang dilakukan mencakup survei atas reaksi pengunjung terhadap isu-isu keberlanjutan.
Bukti Pendukung	Laporan <i>exit survey</i> mengenai tingkat kepuasan wisatawan terhadap pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Komponen <i>exit survey</i> telah mencakup isu-isu keberlanjutan. Pelaksanaan <i>exit survey</i> dilaksanakan terakhir di tahun 2022.
A.II.c.3	Destinasi memiliki bukti atas tindakan yang diambil untuk menanggapi hasil temuan dari survei/umpan balik pengunjung.
Bukti Pendukung	Pelaksanaan pelatihan pariwisata menjadi salah satu tindakan dalam menanggapi hasil <i>exit survey</i> .
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Kebijakan /program yang dilaksanakan belum didokumentasikan sebagai hasil temuan <i>exit survey</i> .
A.II.c.4	Destinasi memiliki contoh-contoh atas informasi pengunjung yang meliputi isu-isu keberlanjutan dan cara menanggapi
Bukti Pendukung	Terdapat laporan <i>exit survey</i> Kepuasan Pengunjung.
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Data tindak lanjut terhadap hasil <i>survey</i> belum didokumentasikan dengan baik.

d. Promosi dan informasi	
A.II.d.1	Destinasi memiliki bahan informasi dan promosi yang terkini (mutakhir) dengan konten yang sesuai
Bukti Pendukung	Destinasi memiliki media sosial sebagai kanal informasi dan promosi link instagram Aplikasi Wisata Labuan Bajo
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Publikasi bahan promosi di kanal media sosial belum konsisten.
A.II.d.2	Terdapat proses yang dilakukan destinasi untuk memeriksa keakuratan dan kesesuaian konten informasi promosi tentang Destinasi.
Bukti Pendukung	Ada tim promosi di Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya Kabupaten Manggarai Barat
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum ditunjukkan proses pemeriksaan keakuratan dan kesesuaian konten informasi promosi
A.II.d.3	Destinasi memiliki bukti konsultasi dengan masyarakat dan badan-badan lingkungan serta budaya setempat tentang isi (konten) promosi dan bagaimana komunikasi dilakukan.
Bukti Pendukung	Belum ada bukti konsultasi mengenai konten promosi
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Sudah ada situs https://gemesabuanbajo.blogspot.com/ namun belum ada bukti konsultasi konten promosi.
III. Mengelola tekanan dan perubahan	
a. Mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung	
A.III.a.1	Destinasi memiliki strategi dan rencana aksi pengelolaan destinasi yang menjawab musim dan sebaran kunjungan.
Bukti Pendukung	Strategic visitor flow, kajian mengenai pergerakan wisatawan berdasarkan preferensi wisatawan. Kajian ini terakhir dilakukan pada tahun 2021. Ada strategic visitor flow tahun 2020
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Ada menu Mabar Event pada situs Kabupaten Manggarai Barat https://manggaraibaratkab.go.id/event.html , namun tidak terupdate.
A.III.a.2	Terdapat sistem yang memonitor variasi jumlah pengunjung serta lokasi mana yang paling sering dikunjungi sepanjang tahun.
Bukti Pendukung	data kunjungan Disparekrafbud Mabar data kunjungan Kawasan TNK
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya Kabupaten Manggarai Barat (Disparekrafbud Mabar) memiliki data kunjungan berdasarkan daya Tarik wisata yang diperbaharui secara konsisten Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) memiliki sistem pemantauan kunjungan ke Kawasan TNK
A.III.a.3	Destinasi mengidentifikasi dampak dari kegiatan dan volume pengunjung (kunjungan) melalui pengamatan dan umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
Bukti Pendukung	Sudah ada pengamatan mengenai jumlah kunjungan, namun belum mencakup umpan balik dari Masyarakat

	Ada Strategic Visitor Flow yang mencakup umpan balik dari pemangku kepentingan
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Sudah ada identifikasi dan volume pengunjung melalui pengamatan dan umpan balik, namun belum ada dokumentasi pelaksanaan yang dilandasi oleh pengamatan tersebut
A.III.a.4	Terdapat tindakan yang diambil untuk mengelola aliran dan dampak pengunjung.
Bukti Pendukung	Ada penerapan carrying capacity di Taman Nasional Komodo pasca pandemi COVID-19 dengan registrasi <i>online</i> .
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Optimalisasi sistem registrasi wisatawan masih diperlukan.
A.III.a.5	Terdapat strategi pemasaran dan pemilihan target pasar yang memperhatikan pola kunjungan, dampak kunjungan dan kebutuhan destinasi.
Bukti Pendukung	Ada strategic visitor flow tahun 2020
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Strategic Visitor Flow belum mencakup strategi pemasaran. Strategi pemasaran dilakukan oleh sektor swasta.
b. Perencanaan peraturan dan pengendalian pembangunan	
A.III.b.1	Kebijakan, Peraturan atau Panduan spesifik yang mengendalikan pengembangan-didokumentasi dan diidentifikasi berdasarkan judul dan tanggal.
Bukti Pendukung	Perda Manggarai Barat No 10 Tahun 2017 Tentang Bangunan Gedung Perda Manggarai Barat No 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Kebijakan peraturan dan panduan spesifik pengembangan telah disahkan
A.III.b.2	Persyaratan penilaian terhadap dampak lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya pada skala yang memadai untuk menjawab isu-isu jangka panjang bagi Destinasi telah ditetapkan.
Bukti Pendukung	Laporan Exit Survey
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Exit survey mencakup aspek-aspek keberlanjutan, seperti lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi.
A.III.b.3	Terdapat peraturan spesifik yang mengatur penyewaan dan operasional properti untuk kegiatan pariwisata dengan bukti penerapan dan penegakan.
Bukti Pendukung	Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Optimalisasi pendapatan daerah mengenai penertiban asset yang bermasalah.
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Sudah ada regulasi terkait penyewaan dan operasional property milik pemerintah daerah.
A.III.b.4	Terdapat bukti partisipasi publik dalam pengembangan kebijakan, peraturan atau panduan

Bukti Pendukung	Ada partisipasi publik dalam Perda mengenai RIPPARDA, Panduan tentang Lingko Award, dan peraturan lainnya.
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Masyarakat terlibat dalam penyusunan ITMP, Tim Kerja Daerah dalam mendukung pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat. Ada sosialisasi mengenai kebijakan, peraturan, panduan kepada masyarakat
A.III.b.5	Terdapat bukti konsultasi dengan, dan izin dari masyarakat asli atau kelompok etnik minoritas, ketika pengembangan pariwisata sedang diusulkan atau akan terjadi di dalam kawasan mereka.
Bukti Pendukung	Notulensi rapat penyampaian DED Desa Wisata Poco Rutang,
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Konsultasi tentang pengembangan desa wisata di Kabupaten Manggarai Barat belum seluruhnya terdokumentasi
A.III.b.6	Destinasi memiliki bukti komunikasi dan penegakan kebijakan, peraturan atau panduan, pada tahapan perencanaan, pengembangan dan implementasi.
Bukti Pendukung	Peraturan Bupati No 18 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keanekaragaman hayati Ikan Hiu dan Pari Manta sebagai daya Tarik wisata di Kabupaten Manggarai Barat
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Bukti komunikasi dan penegakan kebijakan, peraturan atau panduan, pada tahapan perencanaan, pengembangan dan implementasi belum didokumentasikan.
c. Adaptasi perubahan iklim	
A.III.c.1	Destinasi memiliki strategi pengelolaan (tata kelola) dan rencana aksi yang mengidentifikasi dan menangani isu-isu terkait iklim.
Bukti Pendukung	Perda Kabupaten Manggarai Barat No 2 Tahun 2021 telah mencakup isu-isu terkait iklim.
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Kabupaten Manggarai Barat telah mengatur isu-isu strategis mengenai iklim dalam perda, namun kegiatan penerapan strategi tersebut belum didokumentasikan. Ada rencana untuk mengeluarkan perbub terkait penanaman pohon.
A.III.c.2	Terdapat peraturan, panduan dan zonasi untuk pengembangan kegiatan pariwisata, dan telah mengakomodasi konsekuensi dari perubahan iklim.
Bukti Pendukung	Sudah ada zonasi pengembangan pariwisata dalam Ripparda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 - 2025 berupa Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), Kawasan Strategi Pariwisata Daerah (KSPD).
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Peraturan belum mengakomodasi konsekuensi dari perubahan iklim.
A.III.c.3	Terdapat kajian risiko iklim, meliputi risiko saat ini dan di masa depan, dilakukan dan dibuat tersedia sebagai informasi untuk umum.
Bukti Pendukung	Kajian Cadangan Karbon (C-stock) Bentang Alam Mbeliling (BAM)
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Kajian mengenai risiko iklim dapat diakses melalui instansi terkait.

	Kajian Cadangan Karbon (C-stock) Bentang Alam Mbeliling (BAM) dilakukan pada 2020
A.III.c.4	Terdapat bukti pertimbangan atas dampak dan kontribusi dari ekosistem setempat terhadap adaptasi perubahan iklim.
Bukti Pendukung	Kajian tentang mangrove di BTNK Kajian perhitungan stok karbon di bentang mbeliling. Kajian daya dukung daya tampung lingkungan di tahun 2022. Dokumen Rencana perlindungan lingkungan hidup di tahun 2019.
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Laporan kegiatan masih belum dapat diakses.
A.III.c.5	Tersedia informasi yang terbuka untuk umum mengenai perubahan iklim.
Bukti Pendukung	Aplikasi INATANA
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Aplikasi INATANA belum dapat diakses secara umum.
d. Pengelolaan risiko dan krisis	
A.III.d.1	Pengurangan resiko, pengelolaan krisis dan rencana tanggap darurat bagi kegiatan Pariwisata di Destinasi telah tersedia dan terdokumentasikan.
Bukti Pendukung	Tanda jalur evakuasi di daerah pesisir; Pelaksanaan FGD tentang Tata Cara Menghadapi Bencana Alam Di Kabupaten Manggarai Barat; Peraturan Bupati Manggarai Barat No 61 Tahun 2021 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Manggarai Barat
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Peraturan Bupati Manggarai Barat No 61 Tahun 2021 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Manggarai Barat mencakup rencana aksi daerah terkait penanggulangan bencana.
A.III.d.2	Perencanaan yang telah dibuat dapat mengenali beragam resiko, termasuk bencana alam, terorisme, ancaman kesehatan, pengurang sumber daya dan hal-hal lainnya sesuai dengan keberadaan lokasi.
Bukti Pendukung	BTNK ada upaya mitigasi konflik antara komodo dengan manusia; Emergency komodo (Whatsapp grup) kecelakaan di perairan; Kajian resiko pariwisata di Kelurahan Labuan Bajo dan Desa Gorontalo dilakukan BNPB
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Perencanaan hanya mencakup resiko bencana alam. Belum diketahui perencanaan dalam menghadapi resiko pada aspek lain, seperti kesehatan, terorisme, dan lain-lain.
A.III.d.3	Tata cara komunikasi dapat diidentifikasi untuk digunakan selama dan setelah suatu keadaan darurat.
Bukti Pendukung	Penentuan Titik Kumpul di zona pesisir Labuan Bajo. Tanda Jalur Evakuasi.
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Saat ini sudah ada tanda-tanda yang menjelaskan tata cara komunikasi selama dan setelah suatu keadaan darurat
A.III.d.4	Terdapat program pemberian informasi dan pelatihan tentang resiko dan pengelolaan krisis setempat bagi pelaku di destinasi.

Bukti Pendukung	Materi CARA MENGHADAPI BENCANA ALAM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT oleh BPBD
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Pelaksanaan pelatihan/sosialisasi menghadapi bencana alam di Kabupaten Manggarai Barat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

2) Keberlanjutan Sosial Ekonomi

Bagian keberlanjutan sosial ekonomi terdiri dari 32 indikator. Berdasarkan hasil analisis data yang terkumpul, sebanyak 50% indikator mendapatkan penilaian terpenuhi sepenuhnya. Selanjutnya 38% indikator mendapatkan kategori penilaian sebagian terpenuhi, 6% indikator – kurang terpenuhi, dan 6% mendapatkan kategori penilaian tidak terpenuhi. Lebih detail mengenai penjelasan penilaian indikator bagian keberlanjutan sosial ekonomi berikut ini.

Tabel 6. Penjelasan Penilaian Bagian Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi

I. Memberikan manfaat ekonomi lokal	
a. Mengukur kontribusi ekonomi pariwisata	
B.I.a.1	Destinasi melaksanakan survei data ekonomi yang dilakukan mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain (A.I, institusi pendidikan, Badan Pusat Statistik, dsb)
Bukti Pendukung	Pengukuran KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB tahun 2021. Exit survey Wisatawan Manggarai Barat tahun 2022
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum ditunjukkan pengukuran kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2022 Exit survey telah mencakup pengukuran wisatawan ke Manggarai Barat tahun 2022 dan bekerja sama dengan institusi Pendidikan Politeknik eLBajo Commodus.
B.I.a.2	Destinasi memiliki laporan tahunan tentang kontribusi ekonomi langsung dan tak langsung pariwisata kepada destinasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy.
Bukti Pendukung	Pengukuran KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB tahun 2021, Exit survey Wisatawan Manggarai Barat tahun 2022
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum ditunjukkan pengukuran kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2022
B.I.a.3	Destinasi memiliki data hasil pengukuran dampak ekonomi yang merupakan hasil survei ekonomi pada destinasi (A.I, jumlah pemasukan, jumlah

	pengeluaran, lapangan kerja, investasi dan sebaran manfaat ekonomi di destinasi dan sebagainya)
Bukti Pendukung	Pengukuran KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB tahun 2021.
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Komponen pengukuran baru mencakup pemasukan, belum mencakup jumlah pengeluaran, lapangan kerja, investasi dan sebaran manfaat ekonomi di destinasi dan sebagainya
b. Peluang Kerja dan karir	
B.I.b.1	Destinasi secara berkala maupun secara insidental menyelenggarakan program atau kursus pelatihan ketrampilan yang relevan dengan kebutuhan bidang kepariwisataan setempat.
Bukti Pendukung	Pelaksanaan pelatihan geowisata Sertifikasi pekerja pariwisata dilakukan
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Pelaksanaan pelatihan kepariwisataan telah dilaksanakn melalui kerja sama berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Manggarai Barat. Pelaksanaan Pelatihan diikuti dengan sertifikasi, serta penempatan SDM di industri, seperti program yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan.
B.I.b.2	Destinasi memiliki kesepakatan dengan badan usaha pariwisata setempat yang menyatakan bahwa badan usaha pariwisata akan memberi peluang kerja atau karir yang layak bagi masyarakat pada destinasi.
Bukti Pendukung	Peserta pelatihan terserap oleh sektor akomodasi (hotel) di Labuan Bajo
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Sudah ada penyaluran peserta pelatihan ke industri pariwisata, seperti perhotelan, namun dokumen kerja sama belum dapat ditunjukkan.
B.I.b.3	Destinasi memperhatikan masyarakat setempat yang meliputi perempuan, anak muda, minoritas, dan orang dengan keterbatasan fisik, dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang menunjang kepariwisataan setempat.
Bukti Pendukung	Perempuan dilibatkan dalam pelatihan kriya
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Sudah ada pelaksanaan pelatihan yang melibatkan masyarakat disabilitas
B.I.b.4	Destinasi memiliki mekanisme untuk menerima atau menangani keluhan terkait permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan pada destinasi.
Bukti Pendukung	Perda No 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Perda No 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sudah mencakup layanan pengaduan.
c. Menyokong kewirausahaan lokal dan perdagangan yang berkeadilan	

B.I.c.1	Destinasi mendukung penuh keberadaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melalui pendampingan, keuangan ataupun pemberian kesempatan pengembangan usaha.
Bukti Pendukung	Adanya penyaluran permodalan UMKM
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan melakukan pameran UMKM. (Disparekrabud, DisnakertranskopUMKM, BPOLBF)
B.I.c.2	Destinasi membantu UMKM untuk mengakses pasar terkait pariwisata setempat.
Bukti Pendukung	Pelaksanaan pameran UMKM di Labuan Bajo Pelaksanaan Expo Ekonomi UMKM dipromosikan melalui Aplikasi Wisata Labuan Bajo
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Konten informasi dan promosi UMKM di Aplikasi Wisata Labuan Bajo masih sedikit,
B.I.c.3	Destinasi memiliki kesepakatan dengan badan usaha pariwisata setempat yang menyatakan bahwa badan usaha pariwisata akan mengutamakan penggunaan membeli barang dan jasa lokal yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum ada regulasi yang mengatur untuk mengutamakan penggunaan membeli barang dan jasa lokal yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan
B.I.c.4	Destinasi secara aktif membantu petani, pengrajin dan produsen makanan setempat untuk terlibat dalam rantai nilai pariwisata dengan menjadikan produk lokal sebagai bagian dari kegiatan produk pariwisata setempat.
Bukti Pendukung	Pelaksanaan pameran UMKM di Labuan Bajo, Pelaksanaan Expo Ekonomi, UMKM dipromosikan melalui Aplikasi Wisata Labuan Bajo
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Pelaksanaan pameran UMKM di pusat-pusat pariwisata.
B.I.c.5	Destinasi secara berkala mendata dan menyusun daftar tentang produk kerajinan lokal yang disampaikan kepada pengunjung destinasi.
Bukti Pendukung	Konten promosi pada aplikasi Wisata Labuan Bajo
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Konten UMKM di aplikasi Wisata Labuan Bajo masih sedikit dan membutuhkan optimalisasi konten narasi.
II. Kesejahteraan dan dampak sosial	
a. Dukungan bagi masyarakat	

B.II.a.1	Destinasi memiliki mekanisme untuk menghubungkan dan memfasilitasi badan usaha pariwisata setempat dengan masyarakat dalam rangka melaksanakan prakarsa keberlanjutan.
Bukti Pendukung	Kegiatan "Bersih Bajo" yang diprakarsai industri Kegiatan Penanaman Mangrove Pengajakan Masyarakat oleh BUMN untuk peduli lingkungan
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Destinasi ikut mekanisme untuk menjembatani badan usaha pariwisata setempat dengan masyarakat dalam melaksanakan prakarsa keberlanjutan, namun masih bersifat insidental.
B.II.a.2	Destinasi memiliki mekanisme untuk menghubungkan dan memfasilitasi pengunjung dengan masyarakat dalam rangka melaksanakan prakarsa keberlanjutan.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Destinasi belum memiliki mekanisme untuk menghubungkan dan memfasilitasi pengunjung dengan masyarakat dalam rangka melaksanakan prakarsa keberlanjutan.
B.II.a.3	Destinasi memiliki cara-cara persuasif dalam upaya pelibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata.
Bukti Pendukung	Notulensi rapat penyampaian DED Desa Wisata Poco Rutang, Terdapat program Fasilitas Masyarakat Desa Wisata (Fasmadewi).
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Memiliki kegiatan program Fasmadewi
b. Pencegahan eksploitasi dan diskriminasi	
B.II.b.1	Destinasi menetapkan atau memutuskan menggunakan Undang-Undang tertentu terkait hak asasi manusia, eksploitasi, diskriminasi dan pelecehan yang akan dijadikan acuan dan dilaksanakan di destinasi tersebut.
Bukti Pendukung	Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 tahun 2017 Tentang Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Perbup Manggarai Barat No 42 Tahun 2020 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perda No 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan,
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Kabupaten Manggarai telah memiliki regulasi terkait hak asasi manusia, eksploitasi, diskriminasi dan pelecehan.
B.II.b.2	Destinasi melakukan sosialisasi mengenai pemberlakuan undang-undang yang terkait hak asasi manusia, eksploitasi, diskriminasi dan pelecehan yang dijadikan acuan dan dilaksanakan di destinasi tersebut.
Bukti Pendukung	Ada kegiatan sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Polres Kabupaten Manggarai Barat
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Adanya pelaksanaan sosialisasi mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Polres Kabupaten Manggarai Barat, namun sosialisasi mengenai undang-

	undang yang terkait hak asasi manusia, eksploitasi, diskriminasi dan pelecehan belum diketahui.
B.II.b.3	Destinasi memiliki mekanisme untuk memantau berbagai aktivitas yang berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran terkait hak asasi manusia, termasuk perdagangan manusia, perbudakan modern dan pekerja anak. Hasil pemantauan dievaluasi dan ditindaklanjuti.
Bukti Pendukung	Perda Kabupaten Manggarai Barat No 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Perda telah berisi mekanisme memantau berbagai aktivitas yang berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran terkait hak asasi manusia, termasuk perdagangan manusia, perbudakan modern dan pekerja anak.
B.II.b.4	Destinasi dan para pemangku kepentingan pariwisata memiliki komitmen untuk mematuhi aturan, menjaga dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perdagangan manusia, perbudakan modern dan pekerja anak.
Bukti Pendukung	Perda Kabupaten Manggarai Barat No 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perda No 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Diperlukan sosialisasi perda no 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, termasuk dengan badan usaha pariwisata
c. Hak kepemilikan dan pengguna	
B.II.c.1	Destinasi menetapkan atau memutuskan menggunakan Undang-Undang tertentu terkait dengan hak kepemilikan dan akuisisi dan pengguna dan hak akses kepada sumberdaya penting.
Bukti Pendukung	Perda No 11 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2041 terdapat bagian yang mengatur pemanfaatan ruang Ripparda mencakup keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan pariwisata, dimana strateginya "Pemberian peran dan tanggung jawab kepada Pemerintah desa, swasta dan atau masyarakat secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang"
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2041
B.II.c.2	Destinasi menggunakan Undang-Undang yang telah ditetapkan yang terkait dengan hak kepemilikan dan akuisisi dan pengguna dan hak akses kepada sumber daya penting tersebut terhadap hak-hak komunal dan masyarakat asli, konsultasi publik dan pemukiman-kembali.
Bukti Pendukung	Adanya notulen tentang sosialisasi penyampaian DED di Desa Poco Ruteng
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	-

B.II.c.3	Destinasi memiliki bukti penegakkan Undang-Undang terkait dengan hak kepemilikan dan akuisisi dan pengguna dan hak akses kepada sumber daya penting tersebut di atas, dalam konteks pengembangan dan kegiatan pariwisata.
Bukti Pendukung	Adanya Perda No 11 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2041 terdapat bagian yang mengatur pemanfaatan ruang,
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui penegakan Undang-Undang terkait dengan hak kepemilikan dan akuisisi dan pengguna dan hak akses kepada sumber daya penting dalam konteks pengembangan dan kegiatan pariwisata.
B.II.c.4	Destinasi memiliki bukti adanya kegiatan konsultasi kepada masyarakat, persetujuan dan pemberian kompensasi.
Bukti Pendukung	Surat penyerahan tanah dari Masyarakat Adat Tu'a Gendang Kulang kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Sudah ada konsultasi atau diskusi mengenai penyerahan tanah, namun belum diketahui mengenai kompensasi yang diberikan kepada masyarakat.
d. Keselamatan dan keamanan	
B.II.d.1	Tersedia layanan keamanan dan kesehatan yang memenuhi standar kesehatan dan beroperasi aktif yang dapat diakses dengan mudah di destinasi.
Bukti Pendukung	Terdapat fasilitas Kesehatan, seperti klinik, rumah sakit (RSUD, Siloam, St. Yosef), dan puskesmas.
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Jumlah fasilitas kesehatan meningkat di Labuan Bajo maupun UPT puskesmas di desa. Fasilitas keamanan untuk di destinasi wisata di Kabupaten Manggarai Barat belum memadai. Adanya ranger di Kawasan Taman Nasional Komodo Terdapat Basarnas
B.II.d.2	Destinasi memiliki sistem untuk mengidentifikasi kebutuhan pengunjung terkait layanan keamanan dan kesehatan.
Bukti Pendukung	Adanya ranger di Kawasan Taman Nasional Komodo Terdapat Basarnas
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui sistem kegiatan identifikasi kebutuhan pengunjung terkait layanan keamanan dan kesehatan yang dilakukan.
B.II.d.3	Destinasi melakukan inspeksi fasilitas pariwisata secara berkala untuk mengetahui kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan
Bukti Pendukung	Dilakukannya sidak kapal wisata
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui kegiatan sidak kapal merupakan kegiatan rutin atau tidak.
e. Akses untuk semua	

B.II.e.1	Destinasi memiliki peraturan dan standar tentang aksesibilitas pengunjung ke situs, fasilitas dan layanan.
Bukti Pendukung	Ripparda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 - 2025
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Ripparda mencakup keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan pariwisata, pasal 65 tentang zonasi Kawasan pariwisata.
B.II.e.2	Destinasi mengimplementasikan standar aksesibilitas yang konsisten pada berbagai fasilitas umum.
Bukti Pendukung	Ripparda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 - 2025 Terdapat Zonasi di BTNK
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Ripparda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 - 2025 mencakup rencana pengembangan fasilitas umum.
B.II.e.3	Destinasi memiliki sistem untuk mengidentifikasi daya dukung dari situs dan fasilitas pada destinasi sehingga dapat menentukan aksesibilitas pengunjung.
Bukti Pendukung	Sistem registrasi online ke Taman Nasional Komodo
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Adanya pencatatan tingkat kunjungan pada daya Tarik wisata namun daya dukung pada destinasi perlu diidentifikasi
B.II.e.4	Destinasi memiliki program untuk meningkatkan akses bagi orang-orang dengan kebutuhan akses berbeda
Bukti Pendukung	Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 tahun 2017 Tentang Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 tahun 2017 Tentang Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama pasal 26 tentang hak kebudayaan dan pariwisata, Belum diketahui program peningkatan akses bagi orang-orang dengan kebutuhan akses berbeda.
B.II.e.5	Informasi terkait aksesibilitas ke berbagai fasilitas pada destinasi tersedia pada berbagai lokasi dan juga media informasi mengenai destinasi.
Bukti Pendukung	Aplikasi Wisata Labuan Bajo
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Pada deskripsi destinasi sudah menjelaskan mengenai aksesibilitas, namun format penulisan masih belum baku.
B.II.e.6	Terdapat informasi mengenai rincian aksesibilitas yang dicantumkan pada situs-situs utama bagi pengunjung.
Bukti Pendukung	Aplikasi Wisata Labuan Bajo
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum semua informasi menjelaskan rincian aksesibilitas, terutama situs utama, seperti akun media sosial pemerintah.

3) Keberlanjutan Budaya

Bagian keberlanjutan budaya terdiri dari 26 indikator. Berdasarkan hasil analisis data yang terkumpul, sebanyak 38% indikator mendapatkan penilaian terpenuhi sepenuhnya. Selanjutnya 23% indikator mendapatkan kategori penilaian sebagian terpenuhi, 31% indikator – kurang terpenuhi, dan 8% mendapatkan kategori penilaian tidak terpenuhi. Lebih detail mengenai penjelasan penilaian indikator bagian keberlanjutan budaya berikut ini.

Tabel 7. Penjelasan Penilaian Bagian Keberlanjutan Budaya

I. Melindungi warisan budaya	
a. Perlindungan aset budaya	
C.I.a.1	Destinasi memiliki daftar aset budaya yang sudah meliputi evaluasi dan indikasi kerentanan.
Bukti Pendukung	Keputusan Bupati No 94/KEP/HK/ Tahun 2023 Tentang Penetapan Cagar Budaya Ripparda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 - 2025, Gemes Labuan Bajo, Daftar rumah gendang.
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Ripparda dan Gemes Labuan Bajo telah mencakup daftar aset budaya, namun belum mencakup indikasi kerentanan. Sudah ada rencana rehabilitas rumah gendang.
C.I.a.2	Destinasi memiliki program rehabilitasi dan konservasi aset-aset.
Bukti Pendukung	Ripparda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 - 2025 Penetapan petugas pemelihara cagar budaya/situs di wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Ripparda telah mencakup kebijakan revitalisasi aset-aset pariwisata, namun belum diketahui proses monitoring dan evaluasi secara berkala.
C.I.a.3	Destinasi secara terencana mengalokasikan sebagian pendapatan pariwisata untuk menyokong konservasi aset-aset budaya yang ada pada destinasi.
Bukti Pendukung	Perda No 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Ada pengalokasian dana terkait rencana Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, Program Pengembangan Kebudayaan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026
b. Artefak Budaya	
C.I.b.1	Destinasi menetapkan atau memutuskan menggunakan Undang-Undang yang relevan dengan artefak sejarah yang ada di destinasi (judul, tanggal).
Bukti Pendukung	Peraturan Bupati No 63 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wisata Budaya Daerah

Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Dalam Peraturan Bupati No 63 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wisata Budaya Daerah telah menimbang Perpres no 78 tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)
C.l.b.2	Destinasi melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang yang relevan dengan artefak sejarah yang ada di destinasi kepada badan usaha pariwisata dan pengunjung.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui sosialisasi mengenai Undang-Undang yang relevan dengan artefak sejarah yang ada di destinasi kepada badan usaha pariwisata dan pengunjung
C.l.b.3	Destinasi memiliki bukti penegakkan Undang-Undang yang relevan dengan artefak sejarah yang ada di destinasi.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui adanya pelanggaran terkait perlindungan artefak Sejarah.
c. Warisan tak-benda	
C.l.c.1	Destinasi memiliki daftar dan melakukan identifikasi terhadap warisan budaya tak-benda.
Bukti Pendukung	Daftar warisan budaya tak benda dari Kemendikbud. Gemes Labuan Bajo
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Terdapat daftar warisan tak benda yang ada di situs Kemendikbud, seperti Caci, Lodok, dan Penti Gemes Labuan Bajo berisi tentang narasi mengenai warisan budaya tak benda
C.l.c.2	Destinasi memiliki perayaan dan pengalaman pengunjung tentang warisan budaya tak-benda (peristiwa, produk-produk khas setempat, dll).
Bukti Pendukung	Upacara Tiba Meka sebagai upacara penyambutan Pelaksanaan Caci
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Pelaksanaan perayaan dan pengalaman pengunjung tentang warisan budaya tak-benda masih diselenggarakan dan dapat dinikmati oleh pengunjung.
C.l.c.3	Destinasi melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat asli dan setempat dalam mengembangkan dan memberikan pengalaman pengunjung berdasarkan warisan budaya tak-benda.
Bukti Pendukung	Tarian Tiba Meka dilaksanakan saat KTT ASEAN di Labuan Bajo Tahun 2023
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Tarian Tiba Meka, Caci, dan ritus budaya lainnya masih dilakukan dalam rangkaian kegiatan pariwisata.

C.l.c.4	Destinasi memiliki platform atau media yang menampung umpan-balik dari pengunjung dan masyarakat setempat atas pengalaman warisan tak-benda yang disampaikan.
Bukti Pendukung	Buku tamu di desa wisata
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Beberapa desa wisata telah memiliki buku tamu, namun belum diketahui mengenai sistem umpan balik pengunjung atau tidak
d. Akses Tradisional	
C.l.d.1	Destinasi memiliki sistem untuk memonitor aksesibilitas ke situs-situs alam dan budaya untuk masyarakat setempat.
Bukti Pendukung	Penetapan petugas pemelihara cagar budaya/situs di wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui kegiatan monitoring dilakukan secara berkala
C.l.d.2	Destinasi melibatkan masyarakat setempat dalam hal-hal terkait akses tradisional.
Bukti Pendukung	Penetapan petugas pemelihara cagar budaya/situs di wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui kegiatan monitoring dilakukan secara berkala
C.l.d.3	Destinasi melakukan tindakan khusus untuk melindungi dan/atau merehabilitasi akses masyarakat setempat.
Bukti Pendukung	Penetapan petugas pemelihara cagar budaya/situs di wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui tindakan khusus yang dilakukan untuk melindungi dan merehabilitasi akses masyarakat setempat.
e. Hak kekayaan intelektual	
C.l.e.1	Destinasi menetapkan atau memutuskan menggunakan Undang-Undang hak kekayaan intelektual di destinasi (judul, tanggal).
Bukti Pendukung	Perda No 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Kekayaan Intelektual
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Sudah ada perda terkait perlindungan kekayaan intelektual.
C.l.e.2	Destinasi melakukan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual kepada pemangku kepentingan pariwisata yang ada di destinasi.
Bukti Pendukung	Kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual
Skor	4

Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Masyarakat manggarai barat, khususnya terkait kekayaan budaya.
C.I.e.3	Destinasi melindungi hak kekayaan intelektual dalam pengembangan pengalaman budaya bagi pengunjung.
Bukti Pendukung	Kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual Perda No 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Kekayaan Intelektual
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui implementasi Perda No 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Kekayaan Intelektual
II. Mengunjungi situs budaya	
a. Pengelolaan pengunjung pada situs budaya	
C.II.a.1	Destinasi memiliki mekanisme untuk melakukan monitoring aliran pengunjung dan dampak terhadap situs budaya, yang hasilnya disebar di seluruh destinasi.
Bukti Pendukung	Strategic Visitor Flow Pencatatan Kunjungan ke daya Tarik wisata di Kabupaten Manggarai Barat
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Jumlah kunjungan ke destinasi wisata belum dapat diakses secara umum. Pelaksanaan kajian Strategic Visitor Flow masih bersifat insidental, belum termasuk program tetap.
C.II.a.2	Destinasi melakukan tindakan untuk mengelola dampak pariwisata di dalam dan di sekitar situs-situs budaya.
Bukti Pendukung	Ripparda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 - 2025 Penetapan petugas pemelihara cagar budaya/situs di wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Adanya sistem reservasi di desa wisata, seperti di Desa Liang Ndara, terutama pada sanggar budaya.
C.II.a.3	Destinasi memiliki dan mensosialisasikan panduan berperilaku untuk pengunjung situs-situs dan peristiwa budaya yang sensitif dan secara berkala melakukan monitoring kepatuhan terhadap pelaksanaannya.
Bukti Pendukung	Panduan perilaku sering dilakukan secara lisan.
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui sistem monitoring kepatuhan terhadap panduan berperilaku untuk pengunjung situs-situs dan peristiwa budaya yang sensitive
C.II.a.4	Destinasi memiliki kode praktik bagi operator perjalanan dan pemandu wisata dan/atau pelibatan mereka dalam mengelola pengunjung di situs-situs budaya.
Bukti Pendukung	Kode Etik Himpunan Pramuwisata Perbup No 46 Tahun 2018 tentang PRAMUWISATA
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Kode etik dan Perbup No 46 Tahun 2018 tentang Pramuwisata telah mencakup kewajiban pemandu wisata untuk menjaga dan menghormati adat istiadat, kearifan lokal, dsb.

C.II.a.5	Destinasi menyelenggarakan kegiatan pelatihan pemandu wisata yang salah satu materinya adalah kode praktik bagi operator perjalanan dan pemandu wisata dan/atau pelibatan mereka dalam mengelola pengunjung di situs-situs budaya.
Bukti Pendukung	Terlaksananya pelatihan kepemanduan
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui materi pelatihan pemandu wisata.
b. Interpretasi Situs	
C.II.b.1	Destinasi memiliki bahan interpretasi yang informatif tentang situs dan dalam format yang dapat diakses sebelum kedatangan.
Bukti Pendukung	Destinasi memiliki media sosial (facebook, dan Instagram) sebagai kanal informasi dan promosi Aplikasi Wisata Labuan Bajo
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Destinasi melakukan promosi melalui media sosial dan aplikasi wisata labuan bajo
C.II.b.2	Destinasi dapat membuktikan bahwa bahan interpretasi telah diteliti dengan cermat dan akurat.
Bukti Pendukung	Destinasi memiliki media sosial (facebook dan Instagram) sebagai kanal informasi dan promosi
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui SOP atau sistem publikasi konten promosi di kanal promosi resmi pemerintah daerah.
C.II.b.3	Bahan interpretasi yang ada mencakup bahasan terkait identifikasi pentingnya situs dan kepekaan atau kerapuhannya.
Bukti Pendukung	Destinasi memiliki media sosial (facebook dan Instagram) sebagai kanal informasi dan promosi
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Narasi belum mencakup kepekaan dan kerapuhan situs.
C.II.b.4	Bahan interpretasi yang tersedia disiapkan secara bersama-sama oleh masyarakat tuan rumah dan pengelola destinasi sehingga tersusun bahan interpretasi yang sesuai.
Bukti Pendukung	Destinasi memiliki media sosial (facebook dan Instagram) sebagai kanal informasi dan promosi
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui keterlibatan masyarakat tuan rumah dalam proses penyusunan bahan interpretasi
C.II.b.5	Destinasi memiliki bahan interpretasi yang tersedia pada beragam bahasa yang sesuai.
Bukti Pendukung	Destinasi memiliki media sosial (facebook dan Instagram) sebagai kanal informasi dan promosi
Skor	3

Evaluasi (kondisi saat ini)	Konten di aplikasi Wisata Labuan Bajo telah memiliki fitur Bahasa Inggris
-----------------------------	---

4) Keberlanjutan Lingkungan

Bagian keberlanjutan budaya terdiri dari 65 indikator. Berdasarkan hasil analisis data yang terkumpul, sebanyak 29% indikator mendapatkan penilaian terpenuhi sepenuhnya. Selanjutnya 15% indikator mendapatkan kategori penilaian sebagian terpenuhi, 31% indikator – kurang terpenuhi, dan 15% mendapatkan kategori penilaian tidak terpenuhi.

Tabel 8. Penjelasan Penilaian Bagian Lingkungan

I. Konservasi warisan alam	
a. Perlindungan lingkungan sensitif	
D.I.a.1	Destinasi memiliki daftar situs dan aset warisan alam yang memuat jenis, status kerentanan dan upaya perlindungan.
Bukti Pendukung	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 - 2025 Website resmi Disparekrabud
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Dalam ripparda sudah mencakup situs dan aset warisan alam, namun belum mencakup status kerentanan dan upaya perlindungan. Pada situs resmi disparekrabud sudah ada menu daya tarik alam, namun belum daftar situs dan aset warisan alam Belum diketahui daftar situs dan aset warisan alam yang ada di pemangku kepentingan lain, seperti Balai Taman Nasional Komodo dan BPOLBF.
D.I.a.2	Destinasi melakukan program konservasi keanekaragaman hayati dan warisan alam menurut skala dan kapasitas destinasi.
Bukti Pendukung	Penanaman Mangrove Penanaman pohon
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui program monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan konservasi yang dilakukan.
D.I.a.3	Destinasi memiliki sistem atau program mengendalikan spesies jenis asing invasif.
Bukti Pendukung	Strategi Nasional dan Arah Rencana Aksi Pengelolaan Jenis Asing Invasif di Indonesia (BTNK)
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui secara detail sistem/program pengendalian spesies jenis asing invasif

D.I.a.4	Destinasi melakukan upaya identifikasi, pemantauan dan mitigasi dampak pariwisata terhadap keanekaragaman hayati dan warisan alam.
Bukti Pendukung	Program identifikasi, pemantauan dan mitigasi dampak pariwisata oleh BTNK
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Ada pemantauan jumlah Komodo di TNK
D.I.a.5	Destinasi melakukan mekanisme untuk menggunakan pendapatan dari pariwisata untuk mendukung konservasi aset alam.
Bukti Pendukung	Perda No 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Rencana untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berbasis Kelestarian Lingkungan, Namun belum diketahui program monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai penggunaan pendapatan dari pariwisata untuk mendukung konservasi aset alam
D.I.a.6	Destinasi melakukan komunikasi dengan pengunjung dan badan usaha untuk mengurangi penyebaran spesies asing invasif.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui bentuk komunikasi atau sosialisasi dengan pengunjung dan badan usaha untuk mengurangi penyebaran spesies asing invasif.
b. Pengelolaan pengunjung pada situs alam	
D.I.b.1	Destinasi memiliki mekanisme mengatur pergerakan atau aliran pengunjung.
Bukti Pendukung	Strategic visitor flow, Data kunjungan ke DTW Ada peraturan do's and don'ts di DTW Ada sistem registrasi online ke Kawasan TNK
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Data kunjungan tiap DTW di Kabupaten Manggarai Barat dimonitoring secara berkala Diperlukan optimalisasi sistem registrasi online bagi pengunjung ke Kawasan TNK
D.I.b.2	Destinasi melakukan tindakan untuk mengelola dan mencegah dampak pariwisata maupun aktivitas terkait pariwisata pada dan disekitar situs alam.
Bukti Pendukung	Adanya ranger di Kawasan TNK Adanya petugas di DTW di Kabupaten Manggarai Barat (Cunca Wulang, Gua Rangko, dan Batu Cermin)
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui tindakan pengelolaan dan pencegahan dampak pariwisata maupun aktivitas terkait pariwisata pada dan disekitar situs alam (Disparekrafbud)
D.I.b.3	Destinasi memiliki panduan berperilaku bagi pengunjung di situs-situs sensitif dan membuat sebaran publikasinya serta melakukan monitoring kepatuhan pengunjung secara periodik.

Bukti Pendukung	Terdapat do's and don't's di DTW
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui tindakan monitoring kepatuhan secara periodic di DTW. Terkadang penduduk sekitar DTW yang tidak memenuhi peraturan
D.I.b.4	Destinasi memiliki kode praktik bagi operator perjalanan dan pemandu wisata dan menunjukkan pelibatan mereka dalam pengelolaan pengunjung di situs alam.
Bukti Pendukung	Terdapat Perbup No 64 Taun 2018 tentang Kepramuwisataan Terdapat Kode Etik Kepemanduan HPI
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Peraturan telah berisi kewajiban pramuwisata untuk menaati kode etik profesi.
D.I.b.5	Destinasi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan konservasi setempat untuk mengidentifikasi risiko lingkungan dari pariwisata dan cara-cara mengatasinya.
Bukti Pendukung	Kajian resiko yang dilakukan oleh BTNK
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui kajian risiko lingkungan dari pariwisata dan cara-cara mengatasinya
D.I.b.6	Destinasi memfasilitasi pelatihan bagi pemandu wisata dan komunitas.
Bukti Pendukung	Pelaksanaan pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, BPOLBF
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Pelatihan kepemanduan secara berkala dilakukan.
c. Interaksi dengan hidupan-liar	
D.I.c.1	Destinasi mengacu pada Undang-undang internasional, nasional, dan lokal tentang interaksi dengan kehidupan liar dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata.
Bukti Pendukung	Peraturan mengenai hewan yang dilindungi di destinasi Ada aturan di taman nasional komodo
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Ranger dan pemandu wisata ikut mensosialisasikan tentang interaksi dengan kehidupan liar dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata.
D.I.c.2	Destinasi mengacu dan menerapkan standar nasional dan internasional untuk kegiatan wisata yang melibatkan kehidupan liar di laut maupun darat.
Bukti Pendukung	Terdapat aturan berkunjung ke TNK
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Aturan berkunjung disosialisasikan melalui media sosial. Destinasi memiliki aturan yang tercetak di pintu masuk (cunca wulang)

D.1.c.3	Destinasi melakukan penyebaran kode praktik untuk berinteraksi dengan kehidupan liar, termasuk pengamatan, yang mencerminkan standar nasional dan internasional.
Bukti Pendukung	Adanya forum komunikasi pariwisata yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Ada tindakan tegas bagi pemandu wisata atau badan usaha yang melanggar peraturan di TNK
D.1.c.4	Destinasi memiliki sistem untuk memeriksa kepatuhan peraturan dan kode praktik di antara kegiatan pariwisata.
Bukti Pendukung	Tindakan penertiban badan usaha dan pemandu wisata yang tidak mematuhi peraturan
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Adanya penindakan tegas terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode praktik di antara kegiatan pariwisata.
D.1.c.5	Destinasi melakukan pemantauan kesejahteraan kehidupan liar dan upaya minimalisasi gangguan di lokasi interaksi.
Bukti Pendukung	Terdapat kegiatan monitoring kehidupan liar di TNK,
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	BTNK memiliki kegiatan dan program pemantauan kehidupan liar 10 kali tiap tahun dengan kerja sama dengan yayasan Komodo Survival.
D.1.c.6	Destinasi menginformasikan kepada pengunjung mengenai interaksi kehidupan liar yang berbahaya, seperti menyentuh dan memberi makan.
Bukti Pendukung	Sosialisasi kegiatan yang tidak boleh dilakukan di Kawasan Taman Nasional Komodo
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Sosialisasi dilakukan melalui media sosial.
d. Eksploitasi species dan kesejahteraan satwa	
D.1.d.1	Destinasi mengacu pada Undang-undang internasional, nasional, dan lokal tentang kelestarian satwa dan konservasi spesies dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata.
Bukti Pendukung	Perbup No 18 Tahun 2019 Tentang perlindungan keanekaragaman hayati Ikan Hiu dan Pari Manta sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Manggarai Barat
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Monitoring perlindungan terhadap satwa dan konservasi spesies tetap dilakukan.
D.1.d.2	Destinasi menginformasikan Undang-undang, standar dan panduan kepada badan usaha pariwisata dan pemandu wisata.
Bukti Pendukung	Terdapat forum komunikasi pariwisata
Skor	3

Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui bukti tertulis mengenai sosialisasi terhadap Undang-undang, standar dan panduan kepada badan usaha pariwisata dan pemandu wisata.
D.I.d.3	Destinasi melakukan pemeriksaan kondisi hewan liar dan peliharaan yang ditangkar, termasuk kandang dan penanganannya.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui program adanya pemeriksaan kondisi hewan liar dan peliharaan yang ditangkar, termasuk kandang dan penanganannya
D.I.d.4	Destinasi memfasilitasi lisensi dan pemeriksaan kualifikasi dari personil yang bertanggung jawab terhadap kehidupan liar yang ditangkar.
Bukti Pendukung	Terdapat polisi hutan dan ranger di BTNK Terdapat dokter hewan di dinas peternakan
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Ada sistem rekrutmen.
D.1.d.5	Destinasi mempromosikan standar, panduan dan peraturan internasional, nasional dan lokal (seperti Convention on International Trade in Endangered Spesies/CITES dan ratifikasinya di Indonesia serta aturan nasional maupun lokal lainnya yang selaras) pada sektor pariwisata dan untuk memastikan kepatuhan terhadapnya.
Bukti Pendukung	Konten media sosial yang menjelaskan panduan sesuai peraturan internasional.
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui promosi standar yang disosialisasikan sudah menggunakan Bahasa asing
D.I.d.6	Destinasi memberikan informasi kepada pengunjung agar menghindari aktivitas yang memperdagangkan spesies berstatus terancam, pembelian cenderamata yang berasal dari kehidupan liar dalam daftar IUCN/CITES atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi atau peraturan lainnya yang selaras.
Bukti Pendukung	Konten media sosial tentang pelarangan memperdagangkan spesies berstatus terancam.
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui promosi standar yang disosialisasikan sudah menggunakan Bahasa asing
D.I.d.7	Destinasi memastikan penegakan peraturan bahwa setiap kegiatan berburu merupakan bagian dari pendekatan konservasi yang ditegakkan dengan ketat, dikelola dengan seksama dan berbasis ilmiah.
Bukti Pendukung	Perbup No 18 Tahun 2019 Tentang perlindungan keanekaragaman hayati Ikan Hiu dan Pari Manta sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Manggarai Barat, link Perlindungan Keanekaragaman Hayati Ikan Hiu dan Pari Manta Sebagai daya Tarik Wisata Di Kabupaten Manggarai Barat.PDF (manggaraibaratkab.go.id)
Skor	4

II. Pengelolaan sumberdaya	
a. Konservasi Energi	
D.II.a.1	Destinasi menargetkan konsumsi energi dari kegiatan pariwisata yang dipublikasikan dan dipromosikan.
Bukti Pendukung	Perda No 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Dalam RPJMD mencakup isu strategis tentang energi baru yang terbarukan, namun belum mencakup target konsumsi.
D.II.a.2	Destinasi memiliki program penerapan efisiensi energi, antara lain mempromosikan dan menyokong isolasi ruang.
Bukti Pendukung	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) melakukan Lingko Award
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Lingko award mencakup penilaian terhadap upaya penghematan energi.
D.II.a.3	Destinasi memastikan peluang investasi untuk energi terbarukan dan persen total pengadaan atau konsumsi energi.
Bukti Pendukung	Pemerintah Daerah menetapkan tiga wilayah untuk energi hijau
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Ada PLTS di beberapa wilayah Kabupaten Manggarai Barat, seperti Pulau Papagarang, Pulau Messah, Pulau Seraya, dan Batu Tiga,
D.II.a.4	Destinasi mendukung dan memberikan insentif bagi badan usaha yang melakukan pemantauan dan pengurangan energi.
Bukti Pendukung	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) melakukan Lingko Award.
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Lingko award mencakup penilaian terhadap upaya penghematan energi.
b. Penatalayanan air	
D.II.b.1	Destinasi menyediakan panduan dan dukungan untuk monitoring dan pengurangan pemakaian air oleh badan usaha.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui adanya panduan/program penghematan dan pengurangan air oleh badan usaha
D.II.b.2	Destinasi memiliki program atau kerjasama untuk mengkaji risiko air secara teratur.
Bukti Pendukung	Perumda Wae Mbeliling melakukan kajian terhadap kualitas air Terdapat upaya peningkatan kualitas air bersih oleh Perumda Bidadari.

Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui detail program kajian kualitas air oleh Perumda Wae Mbeliling
D.II.b.3	Destinasi mempublikasikan dan menegakkan tujuan penatalayanan air ketika hasil kajian menunjukkan risiko air yang tinggi.
Bukti Pendukung	Adanya penegakan hukum terhadap pencemaran kualitas air di Wae Mese.
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Penegakan hukum bagi pelaku pencemar kualitas air Wae Mese.
D.II.b.4	Destinasi melakukan monitoring dan pengendalian sumber dan jumlah air yang digunakan untuk kebutuhan pariwisata dan dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem setempat, serta mempromosikan dan memeriksa kepatuhan terhadap tujuan penatalayanan air.
Bukti Pendukung	Lingko Award
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Lingko award mencakup penilaian terhadap penggunaan air di industri pariwisata Program lingko award atau program lainnya monitoring dan pengendalian sumber dan jumlah air yang digunakan untuk kebutuhan pariwisata dan dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem setempat belum dilakukan secara berkala.
D.II.b.5	Destinasi menginformasikan pengunjung tentang risiko air dan meminimalisir pemakaian air.
Bukti Pendukung	Lingko award
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Lingko award mendorong industri melakukan penghematan penggunaan air.
c. Kualitas Air	
D.II.c.1	Destinasi melakukan monitoring kualitas air.
Bukti Pendukung	Ada program Pengukuran air di cek dalam 3 bulan sekali kerjasama antara dinas kesehatan dan PDAM masih dilakukan.
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui hasil dokumentasi monitoring kualitas air yang dilakukan.
D.II.c.2	Destinasi memiliki data dan laporan tentang kualitas air.
Bukti Pendukung	Ada kegiatan monitoring kualitas air yang dilakukan oleh Perumda Wae Mbeliling
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui tindakan evaluasi berdasarkan laporan kualitas air secara berkala.

D.II.c.3	Destinasi melakukan monitoring kualitas air untuk mandi, sesuai standar baku mutu dan identifikasi situs-situs yang memenuhi standar.
Bukti Pendukung	Rencana melakukan survey kualitas air
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui hasil kegiatan survey kualitas air Belum diketahui kegiatan survey kualitas air lainnya oleh instansi dan OPD terkait
D.II.c.4	Destinasi menunjukkan upaya atau tindakan untuk meningkatkan kualitas air.
Bukti Pendukung	Upaya perluasan layanan air bersih oleh Perumda Wae Mbeliling Upaya pembersihan reservoir air untuk peningkatan kualitas air
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui program berkala untuk peningkatan kualitas air.
D.II.c.5	Destinasi menginformasikan pengunjung tentang kualitas air minum setempat, untuk mendorong pemakaiannya sebagai alternatif dari air kemasan
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum terdapat informasi kepada pengunjung tentang kualitas air minum di destinasi.
III. Pengelolaan limbah dan emisi	
a. Air limbah	
D.III.a.1	Destinasi memiliki panduan tertulis dan peraturan tentang pengolahan limbah.
Bukti Pendukung	-
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Pengelolaan air limbah masih menggunakan panduan dari nasional.
D.III.a.2	Destinasi memiliki sistem penegakan hukum atau aturan terhadap badan-badan usaha.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui regulasi mengenai penegakan hukum terkait aturan terhadap badan usaha tentang pengolahan air limbah
D.III.a.3	Destinasi melakukan monitoring atau pengujian air limbah yang dibuang.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui program monitoring atau pengujian air limbah yang dibuang, termasuk oleh badan usaha di bidang pariwisata.
D.III.a.4	Destinasi memiliki program atau sistem pengolahan air yang berkelanjutan, untuk digunakan oleh sektor pariwisata, bila mungkin dan sesuai.

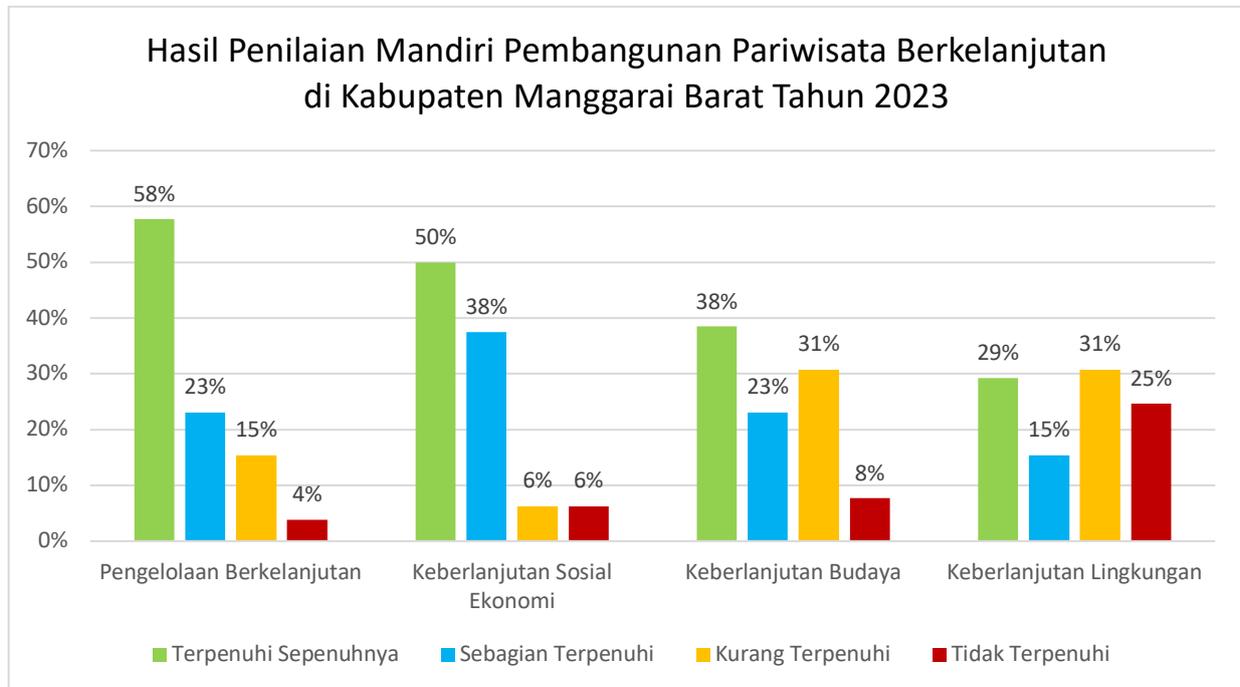
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui adanya program atau sistem pengolahan air yang berkelanjutan di sektor pariwisata.
b. Limbah padat	
D.III.b.1	Destinasi memiliki program monitoring limbah padat dengan hasil dan target dipublikasikan.
Bukti Pendukung	Perda No. 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengolahan Sampah
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Hasil monitoring sampah belum rutin didokumentasikan dan dipublikasikan secara umum.
D.III.b.2	Destinasi melakukan kampanye, saran atau dukungan terkoordinasi dengan badan usaha pariwisata dalam pengelolaan limbah padat, termasuk limbah makanan.
Bukti Pendukung	Kegiatan beach clean up yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Kegiatan <i>clean up</i> dilakukan dengan kegiatan untuk memperingati hari air dunia, hari lingkungan, dsb.
D.III.b.3	Destinasi melakukan kampanye untuk mengurangi atau menghilangkan barang sekali-pakai, terutama plastik.
Bukti Pendukung	Perda No. 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengolahan Sampah
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui adanya kampanye pengurangan atau menghilangkan barang sekali-pakai, terutama plastik. Perda telah mencakup penggunaan sampah sekali pakai.
D.III.b.4	Destinasi memiliki program pengelolaan limbah untuk badan-badan usaha pariwisata (skala rumah maupun kantor) dan fasilitas publik.
Bukti Pendukung	Perda No 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026 terdapat program pengolahan limbah, namun belum diketahui dokumentasi program pengelolaan limbah untuk usaha pariwisata dan fasilitas public.
D.III.b.5	Destinasi melakukan sistem pengumpulan dan pendaur-ulangan, untuk paling tidak empat jenis limbah (organik, kertas, gelas dan plastik).
Bukti Pendukung	Terdapat sistem pengangkutan sampah
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui SOP pemilahan sampah pada saat penangkutan sampah. Pemilahan keranjang sampah belum empat jenis, (organik, kertas, gelas dan plastic)

D.III.b.6	Destinasi melakukan sistem pembuangan residu limbah secara aman dan berkelanjutan.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui sistem pembuangan residu limbah di Kabupaten Manggarai Barat
D.III.b.7	Destinasi melakukan kampanye untuk menghilangkan sampah, termasuk oleh pengunjung, dan untuk menjaga ruang publik bersih.
Bukti Pendukung	Adanya do's and don't pada setiap daya tarik wisata.
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Pemandu wisata juga mengajak wisatawan untuk tidak membuang sampah sembarangan.
D.III.b.8	Destinasi memiliki tempat sampah yang cukup dan memadai untuk pembuangan sampah terpisah.
Bukti Pendukung	Penyediaan tempat sampah di destinasi dan ruang public (water front, puncak waringin, dll)
Skor	4
Evaluasi (kondisi saat ini)	Ada pemilihan kantong sampah di tempat sampah yang disediakan.
c. Emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim	
D.III.c.1	Destinasi memiliki target yang dilaporkan dan dipublikasikan tentang persentase pengurangan emisi dan tanggalnya.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui target pengurangan emisi/gas rumah kaca.
D.III.c.2	Destinasi memiliki bentuk pelaporan rutin (tahunan atau siklus waktu sesuai kebutuhan destinasi) tentang iklim, termasuk tindakan monitoring dan mitigasi.
Bukti Pendukung	Terdapat peta berdasarkan jenis bencana.
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui pelaporan rutin tentang iklim termasuk tindakan monitoring dan mitigasi secara berkala.
D.III.c.3	Destinasi menyokong dan/atau melakukan kampanye serta pelibatan dengan badan usaha pariwisata dalam hal pengurangan dan mitigasi emisi.
Bukti Pendukung	Keputusan Bupati No 237/KEP/HK/2022 Tentang Pengurus Forum Penurunan Resiko Bencana Kabupaten Manggarai Barat
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Dalam kepengurusan terdapat perwakilan dunia usaha. Belum diketahui kampanye untuk pengurangan dan mitigasi emisi.

D.III.c.4	Destinasi memiliki program atau kegiatan untuk mengurangi emisi dari operasi sektor publik.
Bukti Pendukung	Perda No 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	RPJMD mencakup kebijakan emisi gas rumah kaca. Belum diketahui implementasi kebijakan emisi gas rumah kaca
D.III.c.5	Destinasi menginformasikan badan usaha dan pengunjung tentang skema yang memenuhi standar terkait penggantian jejak karbon (carbon offset) dari kegiatan pariwisata.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui program terkait penggantian jejak karbon (carbon offset) dari kegiatan pariwisata bagi badan usaha dan pengunjung.
d. Transportasi berdampak-rendah	
D.III.d.1	Destinasi melakukan investasi dan menyediakan infrastruktur transportasi yang lebih berkelanjutan, termasuk transportasi publik dan kendaraan beremisi rendah.
Bukti Pendukung	Terdapat stasiun pengisian kendaraan listrik di Marina Kampung Ujung
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Sudah ada Noa Bike yang menyewakan sepeda dan motor listrik untuk berkeliling Labuan Bajo
D.III.d.2	Destinasi memberikan informasi kepada pengunjung tentang pilihan transportasi dari, menuju dan didalam destinasi.
Bukti Pendukung	Aplikasi Wisata Labuan Bajo menjelaskan jenis kendaraan yang dapat digunakan untuk menuju daya tarik wisata.
Skor	3
Evaluasi (kondisi saat ini)	Informasi mengenai jenis kendaraan baru menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
D.III.d.3	Destinasi memiliki data tentang penggunaan moda transportasi alternatif yang digunakan pengunjung.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui data penggunaan moda transportasi alternatif
D.III.d.4	Destinasi menunjukkan peningkatan dan melakukan upaya promosi untuk peluang bersepeda dan berjalan kaki.
Bukti Pendukung	Trotoar dan jalur sepeda di pusat-pusat pariwisata di Labuan Bajo
Skor	1

Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui upaya promosi yang dilakukan terkait peluang bersepeda dan berjalan kaki.
D.III.d.5	Destinasi memprioritaskan pasar bagi pengunjung yang mudah diakses melalui pilihan transportasi yang pendek dan lebih berkelanjutan.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui program prioritas pasar bagi pengunjung yang mudah diakses
D.III.d.6	Destinasi melibatkan sektor publik dan Badan usaha pariwisata yang memprioritaskan transportasi berdampak rendah bagi lingkungan dalam operasi mereka.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui program prioritas transportasi berdampak rendah bagi lingkungan dalam kegiatan operasional.
e. Pencemaran Kebisingan	
D.III.e.1	Destinasi memiliki panduan yang dipromosikan kepada masyarakat dan badan usaha pariwisata serta melakukan upaya untuk mengatasi pencemaran cahaya dan kebisingan.
Bukti Pendukung	Pelarangan kembang api di kawasan taman nasional komodo
Skor	2
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui panduan terkait pencemaran cahaya dan kebisingan kepada masyarakat dan badan usaha pariwisata.
D.III.e.2	Destinasi mengidentifikasi dan memonitor sumber potensial pencemaran cahaya dan kebisingan dari kegiatan pariwisata.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum diketahui kegiatan identifikasi dan monitoring sumber potensial pencemaran cahaya dan kebisingan dari kegiatan pariwisata.
D.III.e.3	Destinasi memiliki mekanisme untuk menindaklanjuti pencemaran cahaya dan kebisingan yang melibatkan masyarakat setempat dan badan usaha pariwisata.
Bukti Pendukung	-
Skor	1
Evaluasi (kondisi saat ini)	Belum ada program untuk meminimalkan polusi cahaya dan suara

Lebih detail mengenai hasil penilaian mandiri berdasarkan presentase tingkat keterpenuhan indikator pada tiap bagian penilai mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini.

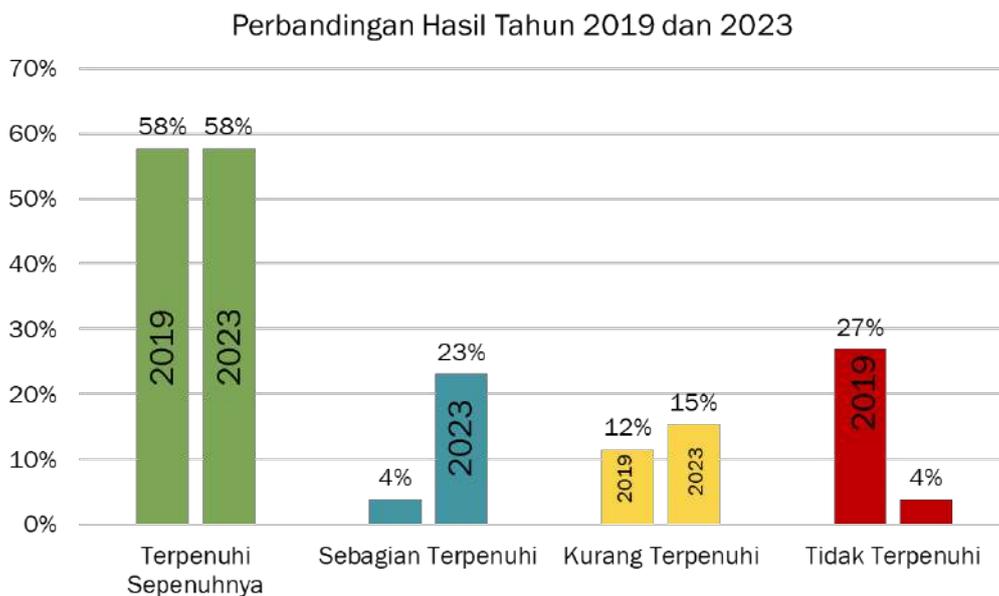


Gambar 6. Hasil Penilaian Mandiri Presentase Tingkat Keterpenuhan Indikator
Sumber: Peneliti, 2023

PEMBAHASAN

1) Pengelolaan Yang Berkelanjutan

Pengelolaan yang berkelanjutan menjadi salah satu aspek yang mengalami perkembangan bila dibandingkan dengan hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan tahun 2019. Perkembangan pada aspek pengelolaan yang berkelanjutan dapat dilihat pada peningkatan presentase pemenuhan indikator dengan penilaian pada dua kategori penilaian, yaitu kategori “sebagian terpenuhi” dan “kurang terpenuhi”. Peningkatan jumlah indikator yang terpenuhi menyebabkan presentase indikator penilaian “tidak terpenuhi” menjadi turun. Dengan kata lain, penurunan jumlah presentase indikator yang mendapatkan kategori penilaian “tidak terpenuhi” menjadi indikator terhadap perkembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat telah berorientasi pada nilai-nilai keberlanjutan, terutama pemenuhan aspek pengelolaan yang berkelanjutan.



Gambar 7. Perbandingan Presentase Tingkat Pemenuhan Indikator Aspek Pengelolaan yang Berkelanjutan

Sumber: Peneliti, 2023

Peningkatan pemenuhan aspek pengelolaan yang berkelanjutan berdasarkan standar GSTC destinasi didasari oleh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan pengembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Salah satu ialah terbentuknya Tim Kerja Daerah dalam mendukung pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat yang telah diatur dalam SK No. 04/KEP/HK/2022. Tim Kerja Daerah yang terbentuk memiliki tugas yang berfokus terhadap pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, diantaranya 1) sosialisasi standar keberlanjutan destinasi dan penerapannya, 2) pemberian masukan terhadap penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Yang Terintegrasi / *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP); 3) melaksanakan penilaian mandiri sesuai standar pariwisata berkelanjutan sesuai Permenpar No. 9 Tahun 2021; 4) memfasilitasi kajian *Strategic Visitor Flow* (SVF); 5) pertemuan berkala; 6) membangun kerja sama dengan perguruan tinggi / akademisi terkait Pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat, dan 7) memberikan masukan terhadap penyusunan RIPPARDA sesuai ITMP.

Sejumlah dokumen regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menjadi pemenuhan indikator pada aspek pengelolaan berkelanjutan, seperti RIPPARDA Kabupaten Manggarai Barat 2014 – 2025 yang telah membahas pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, Rencana Induk Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat 2021 – 2026 telah memasukan unsur korelasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemerintah daerah juga telah memiliki regulasi terkait penyewaan dan operasional properti untuk kegiatan pariwisata, yakni Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Kegiatan yang dilakukan oleh OPD Kabupaten Manggarai Barat juga menjadi pemenuhan terhadap indikator standar GSTC Destinasi, diantaranya 1) *exit survey* Kabupaten Manggarai Barat untuk mengetahui tingkat kepuasan wisatawan terhadap Kabupaten Manggarai Barat, 2) kajian *strategic visitor flow* yang terkait penyebaran wisatawan, 3) kegiatan peanugerahan *Lingko Award* sebagai langkah untuk meningkatkan dan sekaligus mengapresiasi kesadaran

pelaku pariwisata, khususnya industri perhotelan, dan 4) pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata, seperti ke pemanduan, barista, dsb. Selain itu, ketersediaan SOP pelaksanaan kegiatan pariwisata di Kawasan Taman Nasional Komodo dan Kajian Cadangan Karbon (C-stock) Bentang Alam Mbeliling (BAM) juga menjadi pemenuhan indikator dari pemangku kepentingan pariwisata lainnya di Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan lainnya terkait langkah mitigasi bencana juga telah dilakukan, seperti FGD Tata Cara Menghadapi Bencana Alam Di Kabupaten Manggarai Barat, pemasangan titik kumpul dan jalur evakuasi.

Pemenuhan indikator pada aspek pengelolaan yang berkelanjutan juga didasari kegiatan promosi. Daya Tarik wisata yang tersedia di Kabupaten Manggarai Barat telah dipromosikan secara digital melalui *Instagram*, *Facebook*, dan juga situs resmi para pemangku kepentingan (Pemerintah Manggarai Barat, BPOLBF, dan BTNK). Selain itu, terdapat inovasi terkait promosi kepariwisataan dengan ketersediaan aplikasi Wisata Labuan Bajo yang tersedia di *Playstore*, dan *Gemes* (Gerakan Melek Sejarah) Labuan Bajo. Namun demikian, masih indikator yang belum terpenuhi pada aspek pengelolaan yang berkelanjutan, seperti menindaklanjuti umpan balik masyarakat, dan konsultasi bahan promosi.

Namun demikian, pembangunan pariwisata pada aspek pengelolaan yang berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat masih dapat ditingkatkan, terutama ketersediaan sistem dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan, dan diperlukan kegiatan terkait umpan balik tentang perkembangan pariwisata dari masyarakat setempat.

2) Keberlanjutan Sosial Ekonomi

Penilaian mandiri aspek keberlanjutan sosial ekonomi pada tahun 2023 mengalami peningkatan presentase tingkat pemenuhan indikator standar jika dibandingkan dengan hasil penilaian mandiri pada tahun 2019. Kategori pemenuhan penilaian “sebagian terpenuhi” mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2023 presentase indikator pada aspek sosial ekonomi yang mendapatkan penilaian “sebagian terpenuhi”

mencapai 38%, sedangkan pada hasil penilaian di tahun 2019 tidak ada indikator penilaian yang mendapatkan penilaian “sebagian terpenuhi”.

Namun demikian, terdapat penurunan presentase kategori penilaian “terpenuhi sepenuhnya” pada aspek keberlanjutan sosial ekonomi dibandingkan hasil penilaian mandiri tahun 2019. Penurunan presentase indikator yang mendapatkan penilaian “terpenuhi sepenuhnya” juga didasari jumlah indikator pada aspek tersebut. Jumlah indikator pada Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Tahun 2019 ialah 21 indikator, sedangkan jumlah indikator aspek keberlanjutan tahun 2023 mencapai 32 indikator. Perbandingan hasil tahun 2019 dan 2023 dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini.



Gambar 8. Perbandingan Hasil Penilaian Mandiri Tahun 2019 dan 2023 Aspek Keberlanjutan Sosial Ekonomi

Sumber: Peneliti, 2023

Peningkatan presentase pada kategori penilaian “sebagian terpenuhi” didasari oleh ketersediaan hasil kegiatan *monitoring* pada dampak sosial ekonomi perkembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Salah satunya ialah tersedianya dokumen hasil pengukuran kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2021. Selain itu, kajian *exit survey* yang dilakukan telah mencakup tingkat pengeluaran wisatawan selama berlibur di

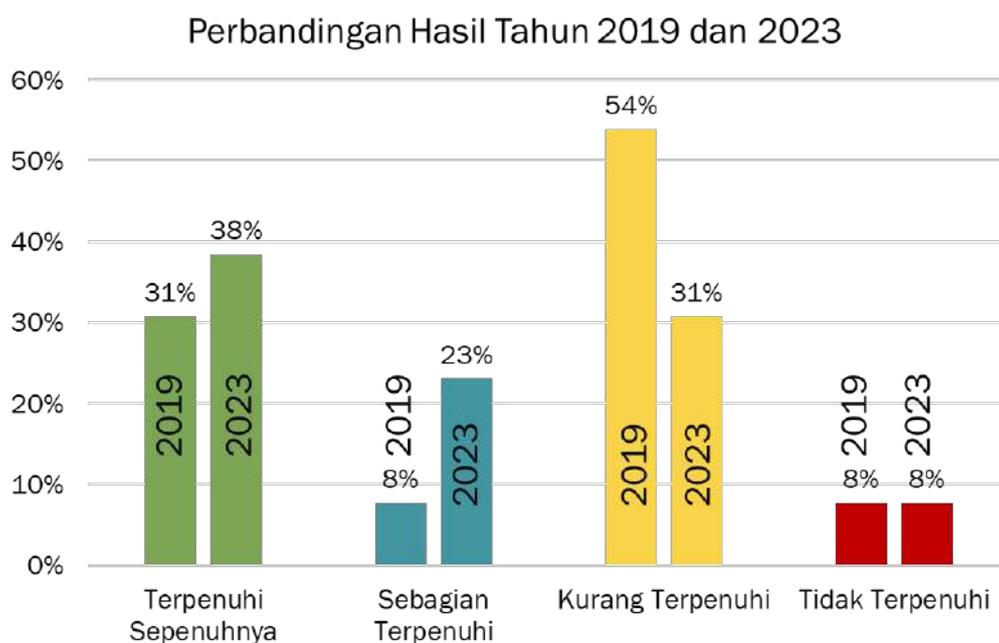
Kabupaten Manggarai Barat. Terlebih, terdapat kebijakan dan kegiatan terkait ketenagakerjaan yang menjadi pemenuhan indikator pada aspek keberlanjutan sosial ekonomi, diantaranya 1) menyelenggarakan program atau kursus pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan bidang kepariwisataan di Labuan Bajo yang juga melibatkan perempuan dan disabilitas, 2) penyerapan peserta pelatihan yang terserap di hotel Labuan Bajo, 3) keterlibatan, 3) mekanisme untuk menerima atau menangani keluhan terkait permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan, dan 4) regulasi terkait pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peningkatan kategori penilaian “sebagian terpenuhi” pada aspek keberlanjutan sosial ekonomi juga didasari kegiatan dan kebijakan terkait UMKM, seperti dilaksanakannya pameran UMKM di pusat-pusat pariwisata dan konten promosi tentang produk UMKM di Kabupaten Manggarai Barat melalui aplikasi Wisata Labuan Bajo.

Akan tetapi, dalam pemenuhan aspek sosial ekonomi masih ada langkah-langkah yang dapat dilakukan, seperti melaksanakan kegiatan atau pertemuan bisnis yang dapat mendorong terjadinya kesepakatan antara petani, pelaku umkm, dan sebagainya dengan badan usaha pariwisata untuk penggunaan membeli barang dan jasa lokal yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan distribusi manfaat langsung perkembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, diperlukan juga mekanisme untuk menghubungkan dan memfasilitasi pengunjung dengan masyarakat dalam rangka melaksanakan prakarsa keberlanjutan. Hal ini bertujuan agar terjadi interaksi masyarakat dengan pengunjung dalam kegiatan praktik pelestarian lingkungan.

3) Keberlanjutan Budaya

Penilaian mandiri aspek keberlanjutan budaya mengalami peningkatan presentase kategori penilaian “terpenuhi sepenuhnya”, dan kategori “sebagian terpenuhi” dibandingkan hasil penilaian hasil mandiri tahun 2019. Peningkatan presentase penilaian kedua kategori penilaian tersebut didasari oleh kegiatan yang sudah terlaksana. Adapun kegiatan yang menjadi pemenuhan indikator pada aspek keberlanjutan budaya, antara lain: 1) penetapan

cagar budaya di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, 2) Peraturan Bupati No 63 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wisata Budaya Daerah, 3) penetapan petugas pemelihara cagar budaya/situs di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, 4) Perda No 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Kekayaan Intelektual, 5) Peraturan Bupati No 46 Tahun 2018 tentang Pramuwisata telah mencakup kewajiban pemandu wisata untuk menjaga dan menghormati adat istiadat, kearifan lokal, 6) terdapat inovasi promosi mengenai kekayaan budaya melalui aplikasi Wisata Labuan Bajo dan situs Gemes (Gerakan Melek Sejarah) Labuan Bajo. Perbandingan hasil penilaian mandiri tahun 2019 dan 2023 dapat dilihat pada Gambar 9 berikut ini.



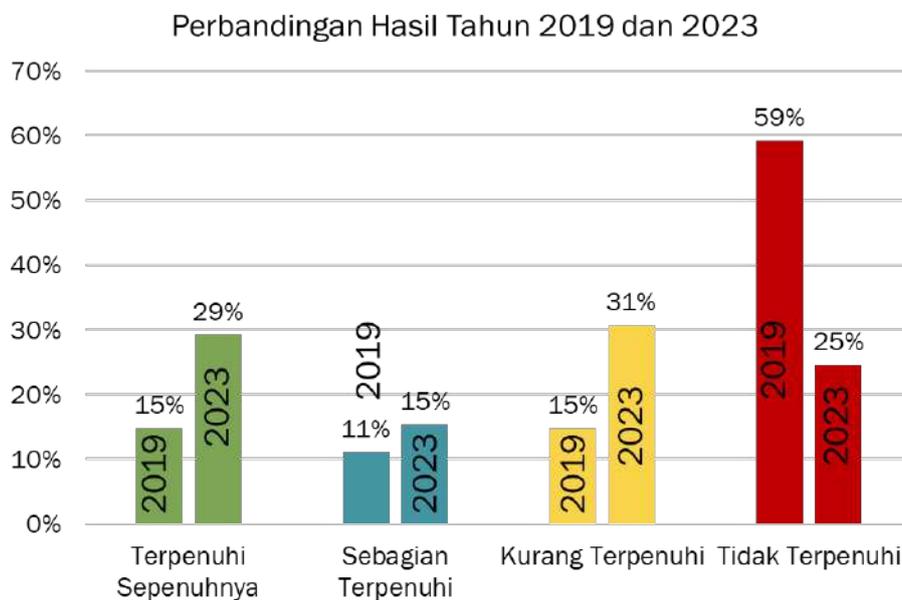
Gambar 9. Perbandingan Hasil Penilaian Mandiri Tahun 2019 dan 2023 Aspek Keberlanjutan Budaya

Sumber: Peneliti, 2023

Akan tetapi, para pemangku kepentingan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat dapat melakukan sejumlah kegiatan untuk peningkatan pemenuhan indikator pada aspek budaya, seperti peningkatan narasi mengenai artefak atau situs budaya yang menjelaskan tingkat kerapuhan, dan juga mekanisme keterlibatan masyarakat, terutama masyarakat sekitar artefak atau situs budaya dalam penyusunan narasi.

4) Keberlanjutan Lingkungan

Berdasarkan hasil analisis perbandingan hasil penilaian mandiri tahun 2019 dan 2023 terjadi peningkatan pemenuhan indikator. Peningkatan pemenuhan indikator dapat dilihat dari turunnya presentase penilaian indikator yang “tidak terpenuhi”, dimana pada tahun 2019 tingkat presentase indikator yang tidak terpenuhi mencapai 59% dan pada tahun 2023 turun menjadi 25%. Penurunan presentase indikator penilaian “tidak terpenuhi” diikuti dengan peningkatan tiga kategori pemenuhan lainnya, yaitu kategori “terpenuhi sepenuhnya”, “Sebagian terpenuhi”, dan “kurang terpenuhi”. Perbandingan hasil tahun 2019 dan tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 10 berikut ini.



Gambar 10. Perbandingan Hasil Penilaian Tahun 20219 dan Tahun 2023 Aspek Keberlanjutan Lingkungan

Sumber: Peneliti, 2023

Peningkatan pemenuhan indikator pada aspek keberlanjutan lingkungan didasari pelaksanaan kegiatan pelestarian oleh seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan pelestarian lingkungan yang dilakukan antara lain penanaman mangrove sebagai program konservasi keanekaragaman hayati dan warisan alam, dan *monitoring* kehidupan liar di Kawasan Taman Nasional Komodo oleh Balai Taman Nasional Komodo. Selain itu, pemenuhan indikator juga

dilandasi ketersediaan regulasi dan pelaksanaan yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti 1) adanya sistem *registrasi online* sebagai salah satu upaya implementasi sistem *carrying capacity* di Taman Nasional Komodo, 2) sosialisasi mengenai aturan hewan yang dilindungi, 3) sosialisasi mengenai aturan dalam berwisata di Kawasan TNK, 4) tersedianya Perbup No 18 Tahun 2019 Tentang perlindungan keanekaragaman hayati Ikan Hiu dan Pari Manta sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Manggarai Barat, 5) penegakan hukum terhadap Tindakan pencemaran kualitas air, 6) program Lingko Award sebagai salah satu langkah kampanye untuk meningkatkan kesadaran pelaku industri pariwisata terhadap pelestarian lingkungan, 7) ketersediaan tempat sampah di pusat kegiatan pariwisata, 8) tersediannya kode etik dalam berwisata di Kawasan Taman Nasional Komodo, Perbup No 64 Tahun 2018 tentang Kepramuwisataaan, dan kode etik profesi pemandu wisata.

Namun demikian masih diperlukan kegiatan atau regulasi yang dapat diterapkan sebagai upaya pemenuhan indikator aspek keberlanjutan lingkungan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pemenuhan indikator aspek keberlanjutan dapat ditingkatkan terutama terkait Tindakan pencegahan penyebaran spesies asing invasif, pedoman atau himbauan mengenai gerakan hemat air, upaya penyebaran kualitas air minum setempat kepada pengunjung untuk mendorong pengurangan air minum dalam kemasan, perhitungan jejak karbon bagi kegiatan pariwisata oleh badan usaha, promosi penggunaan moda transportasi alternatif, pencemaran cahaya dan suara yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata.

PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kabupaten Manggarai Barat telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas dan memiliki citra pariwisata berkelanjutan, sehingga dibutuhkan instrumen monitoring dan evaluasi berstandar. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan mengadaptasi perubahan pada Standar Pariwisata Berkelanjutan kriteria destinasi yang dikeluarkan oleh *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC). Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan ini dapat dijadikan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi pemenuhan pariwisata berkelanjutan pada Kabupaten Manggarai Barat bagi tim atau kelompok kerja.

Hasil penilaian mandiri pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan adanya peningkatan pemenuhan indikator pada tahun 2023 dibandingkan hasil tahun 2019. Peningkatan pemenuhan ini dapat dilihat dari memeningkatnya presentase kategori “terpenuhi sepenuhnya” dan berkurangnya presentase kategori “tidak terpenuhi”. Hal ini didasari kegiatan yang dilakukan dan regulasi yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata dapat memenuhi indikator pariwisata berkelanjutan. Namun demikian, masih diperlukan kegiatan maupun regulasi yang didasari pemenuhan indikator pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan, seperti ketersediaan data, kegiatan kajian yang dilakukan secara periodik, kegiatan sosialisasi dan monitoring terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

Dengan pelaksanaan kegiatan penilaian mandiri pembangunan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pariwisata berkelanjutan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi titik awal untuk meningkatkan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberlanjutan melalui sektor pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penilaian mandiri pembangunan pariwisata berkelanjutan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023, maka sejumlah rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan pemenuhan indikator pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan, antara lain:

1. Optimalisasi sistem Bank Data, seperti **Portal Satu Data Manggarai Barat** sebagai inventarisasi dokumentasi terkait pelaksanaan pariwisata berkelanjutan.
2. Penyelenggaraan kembali **Lingko Award** sebagai kampanye dan monitoring penerapan nilai-nilai keberlanjutan pada badan usaha pariwisata, namun perluasan target kategori yaitu Kapal Wisata.
3. Sinkronisasi dan aktualisasi narasi daya tarik wisata yang mencakup kerentanan di seluruh kanal informasi, seperti **Aplikasi Wisata Labuan Bajo, Gemes Labuan Bajo, Facebook dan Instagram: Echancing Labuan Bajo**, yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan konten informasi (SOP, dokumentasi konsultasi terkait informasi, dsb).
4. Optimalisasi **Aplikasi Wisata Labuan Bajo, Gemes Labuan Bajo, Facebook dan Instagram : Echancing Labuan Bajo** sebagai media umpan balik atau survei wisatawan terhadap pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, dan media sosialisasi *Code of Conduct/Panduan Berwisata* pada setiap daya tarik wisata (alam dan budaya).
5. Peningkatan intensitas **Forum Komunikasi Pariwisata** sebagai wadah interaksi seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata (pemangku kebijakan, industri, dan masyarakat) untuk sosialisasi dan monitoring pelaksanaan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat.
6. Pembuatan **senra Hak Kekayaan Intelektual** sebagai fasilitas akselerasi perlindungan hak kekayaan intelektual.
7. **Pembuatan regulasi** terkait kriteria pariwisata berkelanjutan, seperti penyerapan produk lokal di badan usaha pariwisata, pelestarian artefak dan warisan tak benda,

pengolahan limbah cair, pencegahan pencemaran cahaya dan suara, penghematan energi dan air, serta transportasi ramah lingkungan.

8. **Sosialisasi dan penegakan regulasi**, seperti Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Perda No 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Kekayaan Intelektual, dan Perda No 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagai langkah peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai keberlanjutan.
9. **Melakukan kajian terkait daya tampung daya tarik wisata** yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, seperti Gua Batu Cermin di Desa Batu Cermin, Gua Rangko di Desa Tanjung Boleng, Cunca Plias di Desa Wae Lolos, dan daya tarik wisata lainnya dalam sebagai upaya awal penerapan *carrying capacity*.
10. **Pembuatan regulasi terkait penyerapan bahan lokal** oleh badan usaha pariwisata untuk meningkatkan distribusi langsung kepada masyarakat.
11. **Menyusun pedoman pelaksanaan jasa *homestay* dan *guesthouse*** untuk menjadi standar pelaksanaan usaha *homestay* dan *guesthouse*.
12. **Melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman pariwisata berkelanjutan pada usia sekolah** dengan masukan Sapta Pesona dalam kurikulum pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Yoopetch, C., & Nimsai, S. (2019). Science mapping the knowledge base on sustainable tourism development, 1990-2018. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 13). MDPI. <https://doi.org/10.3390/su11133631>

Bramwell, B., & Lane, B. (1993). Sustainable tourism: An evolving global approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.1080/09669589309450696>

Wagenseil, U., Wyss, M., & Huck, L. (2022). The Case of Sustainable Tourism Development in Alpine Destinations: Importance, Implementation, and the Role of the Local DMO. *Tourism Planning and Development*. <https://doi.org/10.1080/21568316.2022.2107561>

Linnes, C., Agrusa, J., Ronzoni, G., & Lema, J. (2022). What Tourists Want, a Sustainable Paradise. *Tourism and Hospitality*, 3(1), 164–183. <https://doi.org/10.3390/tourhosp3010013>

Berno, T., & Bricker, K. (2001). Sustainable tourism development: the long road from theory to practice. *International journal of economic development*, 3(3), 1-18.

McKercher, B. (2003, November). Sustainable tourism development-guiding principles for planning and management. In *National seminar on sustainable tourism development* (Vol. 1, No. 10).

Guo, Y., Jiang, J., & Li, S. (2019). A sustainable tourism policy research review. *Sustainability (Switzerland)*, 11(11). <https://doi.org/10.3390/su11113187>

Bricker, K. S., & Schultz, J. (2011). Sustainable tourism in the usa: A comparative look at the global sustainable tourism criteria. *Tourism Recreation Research*, 36(3), 215–229. <https://doi.org/10.1080/02508281.2011.11081668>

LAMPIRAN

1. Dokumen Daftar Hadir, Notulensi, Dokumentasi, dan Wokrsheet/Lembar Kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dapat diakses pada tautan bit.ly/timkerjapariwisata.
2. Dokumen pendukung dari tiap OPD ataupun pemangku kepentingan terkait untuk Penilaian Mandiri Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dapat diakses pada tautan bit.ly/DokumenPendukungPenilaianMandiri_ManggaraiBarat



**OUR MISSION IS TO STOP
DEGRADATION OF THE PLANET'S
NATURAL ENVIRONMENT AND
TO BUILD A FUTURE IN WHICH
HUMANS LIVE IN HARMONY**



Working to sustain the natural world for the benefit of people and wildlife.

together possible™

www.wwf.id

© Yayasan WWF Indonesia
For contact details and future information, please visit our website at www.wwf.id